

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2025-2029



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana strategis Sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis Dinas Pendidikan;
 - e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
 - f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - h. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
 - k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - l. rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. rencana strategis Dinas Perhubungan;
 - n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - q. rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. rencana strategis Dinas Pariwisata;
 - s. rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
 - u. rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
 - v. rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - w. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - x. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - y. rencana strategis Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - z. rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (19) Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (22) Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Rencana strategis Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Rencana strategis Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (28) Rencana strategis Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025



Diundangkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 35

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK	II-7
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Solok	II-7
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-9
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Solok.....	II-16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Solok.....	II-19
2.1.3.1 Rata-rata Lama Sekolah.....	II-20
2.1.3.2 Harapan Lama Sekolah	II-21
2.1.3.3 Literasi dan Numerasi	II-22
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-28
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN	III-31
3.1 Tujuan, Sasaran Dan Arah Kebijakan	III-31
3.2 Strategi Dinas Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025-2029	III-33
3.3 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Solok Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029	III-38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-46
4.1 Uraian Program	IV-46
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan	IV-78
4.3 Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-108

4.4 Indikator Kinerja Utama	IV-126
4.5 Indikator Kinerja Kunci	IV-128
BAB V PENUTUP	V-131

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025	II-17
Tabel 2.2 Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025.....	II-17
Tabel 2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025.....	II-18
Tabel 2.4 Jumlah Tenaga Fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025.....	II-19
Tabel 2.5 Data Aset Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2024	II-19
Tabel 2.6 Angka Literasi dan Numerasi Jenjang SD dan SMP Kota Solok Tahun 2021 – 2024.....	II-22
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Solok Tahun 2020 – 2024.....	II-23
Tabel 2.8 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Solok Tahun 2020 – 2024	II-24
Tabel 2.9 Persentase PAUD/SD/MI/SMP/MTs yang terakreditasi di Kota Solok Tahun 2020- 2024	II-25
Tabel 2.10 Perkembangan Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memenuhi Kualifikasi dan Layak Tahun 2020–2024	II-26
Tabel 2.11 Perkembangan Angka Melek Huruf dan Angka Putus Sekolah Kota Solok Tahun 2020 – 2024	II-27
Tabel 2.12 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024	II-27
Tabel 2.13 Pelaksanaan Urusan Kebudayaan Kota Solok Tahun 2020-2024	II-28
Tabel 2.14 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-30
Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	III-33
Tabel 3.2 Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	III-37
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	III-41
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	IV-47
Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan	

Pemerintah Kota Solok.....	IV-79
Tabel 4.3 Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas	
Pembangunan Daerah.....	IV-108
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama	IV-126
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci	IV-128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025-2029 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Renstra ini menjadi pedoman arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Solok selama lima tahun ke depan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua urusan pemerintahan yang memiliki keterkaitan erat dan saling memperkuat dalam membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing serta beridentitas budaya. Pendidikan menjadi instrumen utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sedangkan kebudayaan berfungsi menumbuhkan nilai-nilai moral, etika dan landasan pembangunan karakter. Oleh karena itu, pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan harus dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal.

Secara umum, capaian pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan pada periode sebelumnya telah menunjukkan kemajuan, antara lain meningkatnya angka partisipasi sekolah, penguatan literasi numerasi, berkembangnya pelestarian warisan budaya daerah serta peningkatan peran komunitas budaya dalam kegiatan pemajuan kebudayaan. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi seperti kesenjangan mutu, keterbatasan kompetensi serta pemerataan tenaga pendidik, belum optimalnya pengelolaan data kebudayaan, serta terbatasnya ruang ekspresi dan fasilitas pelaku budaya di tingkat lokal.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola, keterpaduan antarprogram serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat integrasi antara

kebijakan pendidikan dan kebudayaan dalam satu kerangka pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berakar pada budaya bangsa.

Nilai strategis renstra ini mencakup, pemerataan terhadap akses dan mutu pendidikan serta kebudayaan, penguatan tata kelola, kemitraan dan partisipasi publik dalam bidang pendidikan dan kebudayaan serta pembangunan karakter dan jati diri bangsa melalui integrasi nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025–2029, diharapkan terwujud arah kebijakan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan dalam pengelolaan pendidikan daerah. Dokumen ini menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan mutu dan pemerataan Pendidikan serta mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan kebudayaan yang maju.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025–2029** berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1401);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran

Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
14. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Solok

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025–2029** dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi Dinas Pendidikan Kota Solok dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terarah, terpadu, dan selaras dengan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok. Selanjutnya renstra ini juga dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan (Renja), serta menjadi dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan secara periodik.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Solok.

- b. Menjadi pedoman arah pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan agar pelaksanaannya terukur, efisien dan efektif
- c. Mewujudkan sinergitas perencanaan antara pemerintah daerah, perangkat daerah lain, serta pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan dan kebudayaan.
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kota Solok melalui perumusan indikator kinerja utama yang terukur dan selaras dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
- e. Menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja), penganggaran (RKA-SKPD), serta pelaporan kinerja selama periode pelaksanaan Renstra.
- f. Menjamin konsistensi antara kebijakan dan implementasi program dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan akses layanan, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok, dapat diuraikan dengan susunan garis besar dan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan umum mengenai dasar dan arah penyusunan Renstra, meliputi:

1. **Latar Belakang** — menguraikan kondisi umum, tantangan, dan urgensi penyusunan Renstra bidang pendidikan di Kota Solok.
2. **Landasan Hukum** — memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra.
3. **Maksud dan Tujuan** — menjelaskan maksud serta tujuan penyusunan Renstra sebagai pedoman kerja strategis.
4. **Sistematika Penulisan** — menguraikan susunan bab dan isi dokumen Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRAREGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

Menjelaskan kondisi eksisting pelayanan pendidikan di Kota Solok, mencakup:

- 1.** Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Solok.
- 2.** Cakupan dan Jenis Pelayanan Pendidikan (PAUD, SD, SMP, nonformal, dan kebudayaan).
- 3.** Sumber Daya Pendukung (SDM, sarana prasarana, dan pendanaan).
- 4.** Kinerja Pelayanan dan Permasalahan yang Dihadapi.
- 5.** Isu Strategis Pelayanan Pendidikan Kota Solok.

BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Menjabarkan arah pembangunan pendidikan daerah visi dan misi kepala daerah yang relevan dengan bidang Pendidikan, tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan Kota Solok, indikator kinerja dan target pencapaian.

BAB IV : PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan uraian program, uraian kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

Dinas Pendidikan Kota Solok merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan. Ruang lingkup pelayanannya meliputi pengelolaan dan fasilitasi layanan pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP, serta pendidikan nonformal, dan pengelolaan urusan kebudayaan, meliputi pelestarian, pembinaan, dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal.

Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Solok dikelompokkan ke dalam dua bidang utama, yaitu pelayanan di bidang pendidikan dan pelayanan di bidang kebudayaan, serta pelayanan pendukung lainnya.

Pelayanan bidang pendidikan diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, merata, dan relevan dengan perkembangan zaman. Layanan pendidikan mencakup:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Fasilitasi dan pembinaan lembaga PAUD formal dan nonformal.
- Pengembangan PAUD Holistik Integratif yang menggabungkan aspek pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan anak.
- Peningkatan kualitas pendidik PAUD melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan.
- Penguatan peran masyarakat dan lembaga mitra dalam pengelolaan PAUD.

2. Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

- Pembinaan penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai dengan Kurikulum Merdeka.
- Peningkatan mutu pembelajaran melalui asesmen nasional dan program literasi-numerasi.
- Fasilitasi akreditasi dan pengembangan sekolah unggul serta ramah anak.
- Dukungan terhadap program Sekolah Penggerak dan Implementasi Digital Learning.
- Pelayanan administrasi pendidikan dasar, termasuk penerbitan NPSN, NISN, dan dokumen akademik lainnya.

3. Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan

- Penyelenggaraan program kesetaraan Paket A, B, dan C melalui PKBM dan SKB.
- Peningkatan layanan pendidikan masyarakat melalui program kecakapan hidup, kursus, dan pelatihan vokasional.
- Pengembangan dan penguatan gerakan literasi masyarakat.
- Fasilitasi pendirian dan pembinaan lembaga pendidikan nonformal berbasis masyarakat.

4. Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan

- Pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui sekolah inklusif.
- Pemberian dukungan layanan pendidikan untuk keluarga kurang mampu melalui beasiswa dan BOS daerah.
- Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan ramah disabilitas.
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif.

5. Pengembangan dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

- Pelayanan pembinaan karier, kinerja, dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan.
- Fasilitasi sertifikasi profesi guru dan penilaian kinerja berbasis kinerja (PKG dan PKKS).
- Pengembangan Komunitas Belajar Guru (KBG) dan pelatihan berbasis teknologi informasi.
- Pemberian penghargaan dan apresiasi bagi guru berprestasi dan inovatif.

6. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

- Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan.
- Penyediaan dan pengelolaan peralatan pendidikan berbasis TIK.
- Peningkatan kualitas fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah.
- Pelayanan perencanaan dan pengelolaan aset pendidikan secara transparan dan akuntabel.

Pelayanan kebudayaan bertujuan untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan identitas budaya masyarakat Kota Solok. Bentuk pelayanan yang diselenggarakan antara lain:

1. Pelestarian Warisan Budaya

- Inventarisasi, pendokumentasian dan perlindungan cagar budaya dan warisan budaya tak benda.
- Pengelolaan situs, bangunan dan benda bernilai sejarah serta tradisi lokal.
- Fasilitasi penetapan warisan budaya daerah dan pengusulannya ke tingkat provinsi maupun nasional.

2. Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah

- Penyelenggaraan festival seni, lomba budaya, dan pameran kreatif tingkat kota dan antar daerah.
- Pembinaan sanggar seni, kelompok budaya dan pelaku seni kreatif.
- Fasilitasi kegiatan pelajar dalam bidang seni, sastra dan tradisi lokal.
- Pemberdayaan pelaku budaya dalam industri kreatif berbasis kearifan lokal.

3. Penguatan Pendidikan Berbasis Budaya

- Integrasi nilai-nilai budaya lokal dan karakter bangsa ke dalam proses pembelajaran.
- Pengembangan Sekolah Berbasis Budaya dan kegiatan ekstrakurikuler seni.
- Peningkatan peran lembaga pendidikan dalam pelestarian adat dan nilai-nilai kemasyarakatan.

4. Diplomasi dan Promosi Budaya

- Promosi budaya daerah melalui kegiatan pariwisata dan kerja sama antar daerah.
- Publikasi kegiatan budaya dan digitalisasi arsip kebudayaan.
- Pelayanan informasi kebudayaan melalui portal daring dan media sosial resmi.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan Kota Solok

Dinas Pendidikan Kota Solok merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Solok berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Solok, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Solok adalah sebagai berikut :

a. Tugas Dan Fungsi

1) Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan Dinas mempunyai fungsi:

- pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi bidang pembinaan pendidikan dasar;
- pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, monitoring dan evaluasi bidang kebudayaan;
- pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2) Sekretariat

- Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, perencanaan, program, kegiatan, akuntansi dan administrasi keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

- b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja dinas; pengoordinasian penyusunan rencana anggaran dinas;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan; penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup dinas; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
 - f. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi, dan laporan pertanggungjawaban dinas;
 - g. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan dinas;
 - h. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum dan kepegawaian, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kearsipan dan kepustakaan, kerumahtanggaan serta kehumasan dan keprotokoleran;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang/ asset;
 - c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

3) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Dalam melaksanakan tugas bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- k. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- m. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
 - 1. Seksi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidik dan tenaga kependidikan pada bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Dalam melaksanakan tugas pada seksi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi kurikulum dan peserta didik mempunyai tugas melaksanakan urusan kurikulum dan peserta didik pada bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Dalam melaksanakan tugas seksi kurikulum dan peserta didik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang pembinaan pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Dalam melaksanakan tugas bidang pembinaan pendidikan dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- g. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
- h. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- j. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- k. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- l. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
- m. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- n. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan

karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
 1. Seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar. Dalam melaksanakan tugas seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
 2. Seksi kurikulum dan peserta didik mempunyai tugas melaksanakan urusan kurikulum dan peserta didik pada bidang pembinaan pendidikan dasar. Dalam melaksanakan tugas seksi kurikulum dan peserta didik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat,

- bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
 - e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - f. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, serta pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5) Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

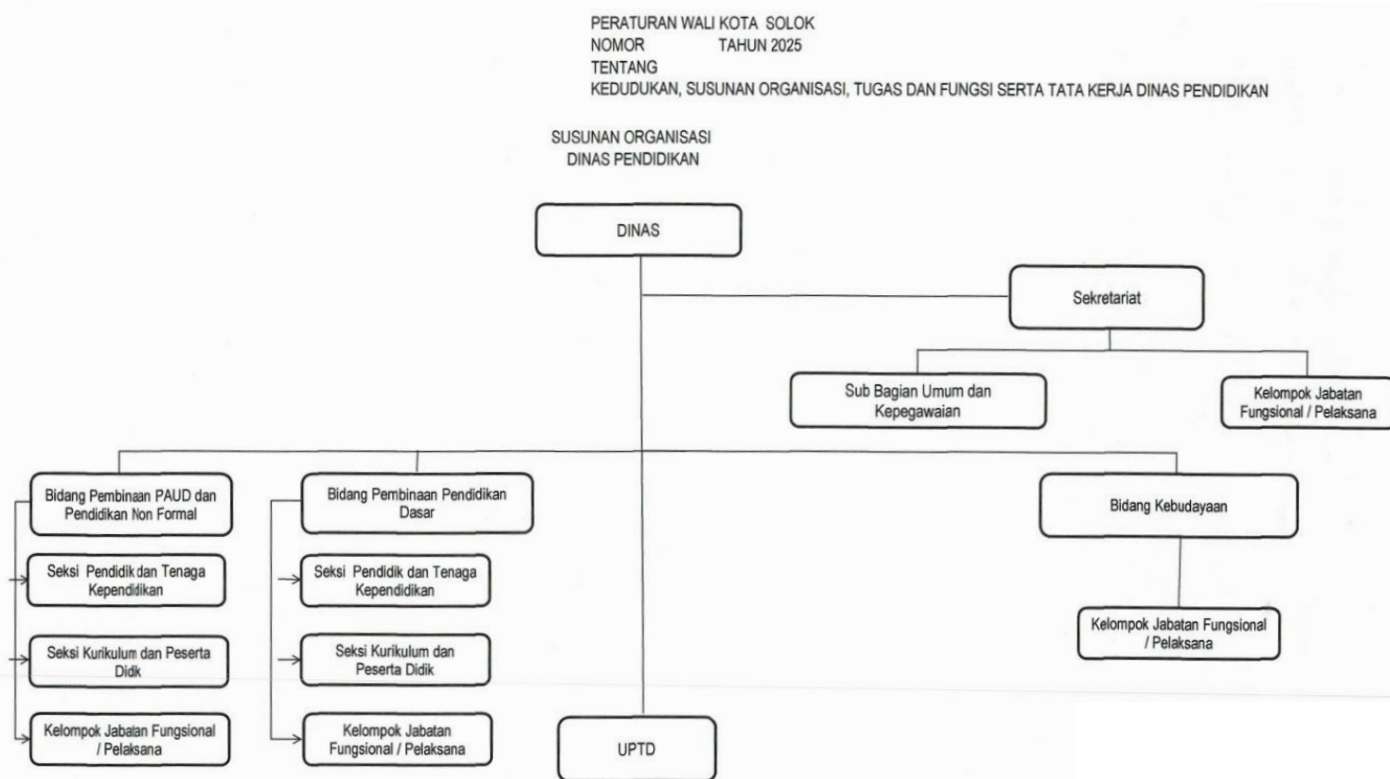
- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- c. merencanakan program kerja bidang kebudayaan terlaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan dibidang kebudayaan berdasarkan prosedur dan kebijakan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
- e. perumusan dan pelaksanaan pembinaan di bidang kebudayaan;
- f. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
- g. perumusan dan pelaksanaan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
- h. perumusan dan pelaksanaan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
- i. perumusan dan pelaksanaan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
- j. perumusan dan pelaksanaan pembinaan peninggalan sejarah;
- k. perumusan dan pelaksanaan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya Daerah;
- l. perumusan dan pelaksanaan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar Daerah;
- m. perumusan dan pelaksanaan fasilitasi di bidang kebudayaan;

- n. perumusan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang kebudayaan;
- o. pelaporan bidang kebudayaan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6) UPTD

Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD. Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Solok



2.1.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Solok

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Solok terdiri atas sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya sarana dan prasarana. Kedua komponen tersebut berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Dalam menjalankan perannya, Dinas Pendidikan Kota Solok didukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1340 orang. Rincian komposisi sumber daya manusia tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin
Pada Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025

NO	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	ASN (PNS dan PPPK)	195	683	878
2	Non ASN (Pegawai Kontrak dan PHL)	101	361	462
TOTAL		296	1044	1340

Sumber Dinas Pendidikan, 2025

Berdasarkan kualifikasi Pendidikan, pegawai Dinas Pendidikan Kota Solok memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh aparatur sipil negara di lingkungan dinas pendidikan. Informasi ini menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia menurut Pendidikan
Pada Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025

NO	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1	S3	2	0	2
2	S2	61	21	82
3	S1	757	355	1112
4	D3	5	12	17
5	SMA	3	102	105
6	SMP	0	15	15
7	SD	0	7	7
TOTAL		828	512	1340

Sumber Dinas Pendidikan, 2025

Berdasarkan data tersebut di atas, struktur pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Solok menunjukkan kondisi yang cukup baik. Sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, dengan rincian yaitu berpendidikan Strata III, II, I, Diploma III, dan SMA dan ditambah 22 orang Pendidikan SMP dan SD. Komposisi ini mencerminkan bahwa mayoritas pegawai telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang relevan dengan bidang tugasnya, sehingga mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan serta kualitas pelayanan pendidikan di Kota Solok.

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia menurut Pendidikan
Pada Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025

NO	Jabatan	Status Kepegawaian		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2	Administrator	3	0	3
3	Pengawas	8	0	8
4	Fungsional Ahli Madya	34	0	34
5	Fungsional Ahli Muda	345	0	345
6	Fungsional Ahli Pertama	677	0	677
7	Staf / Pelaksana	23	249	272
TOTAL		1091	249	1340

Sumber Dinas Pendidikan, 2025

Struktur kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kota Solok menunjukkan bahwa dari total 1.340 pegawai, sebanyak 1.091 merupakan ASN dan 249 Non ASN. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berjumlah 1 orang, sementara jabatan Administrator dan Pengawas masing-masing diisi oleh 3 dan 8 ASN. Pada jabatan fungsional, terdapat 34 Fungsional Ahli Madya, 345 Fungsional Ahli Muda, serta jumlah terbesar berada pada Fungsional Ahli Pertama sebanyak 677 orang, seluruhnya ASN. Adapun jabatan Staf/Pelaksana berjumlah 272 orang, terdiri dari 23 ASN dan 249 Non ASN, yang menunjukkan bahwa pegawai Non ASN paling banyak berperan pada posisi pelaksana. Komposisi ini menggambarkan bahwa struktur organisasi Dinas Pendidikan didominasi oleh ASN pada jabatan strategis dan fungsional, sementara Non ASN memperkuat dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas pelayanan pendidikan.

Tabel 2.4
Jumlah Tenaga Fungsional
pada Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025

No.	Tenaga Fungsional	Jumlah
1.	Guru	813
2.	Penilik	4
3.	Pengawas Sekolah	9
4.	Pamong Belajar	5
5.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
6	Perencana Ahli Pertama	1
7	Penata Laksana Barang Terampil	1
8	Penelaah Teknis Kebijakan	8
9	Pengadministrasi Perkantoran	5
10	Penata Layanan Operasional	2

11	Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	1
12	Perencana Ahli Muda	1
JUMLAH		851

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Solok, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah tenaga fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025 sebanyak 851 orang, yang terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional. Komposisi terbesar berasal dari tenaga guru dengan jumlah 813 orang, atau sekitar 95,5% dari total tenaga fungsional yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya manusia Dinas Pendidikan masih didominasi oleh tenaga pendidik yang bertugas langsung dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan.

2. Sarana dan Prasarana

Sumber daya aset prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Solok yang tersebar pada kantor induk Dinas Pendidikan Kota Solok, SKB dan Sekolah. Adapun rincian data aset Dinas Pendidikan Kota Solok adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5
Data Aset Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025

No	Sarana Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	M ²	1.300	Baik
2	Mobil	Unit	4	7 Baik; 2 Rusak
3	Sepeda motor	Unit	44	39 Baik; 5 Rusak
4	Mesin ketik elektrik	Unit	3	Baik
5	Mikrobus	Unit	1	Baik
6	Mesin hitung uang	Unit	1	Baik
7	Almari Arsip	Unit	64	Baik
8	Rak arsip	Unit	32	Baik

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Solok, 2025

Berdasarkan data sarana dan prasarana yang tersedia, tercatat bahwa tanah yang dimiliki seluas 1.300 m² dalam kondisi baik. Armada transportasi terdiri dari 4 unit mobil, dengan rincian 7 unit dalam kondisi baik dan 2 unit mengalami kerusakan, serta 44 unit sepeda motor yang 39 di antaranya berfungsi baik dan 5 unit dalam kondisi rusak. Peralatan perkantoran diantaranya terdapat 64 unit almari arsip dan 32 unit rak arsip, yang semuanya berada dalam kondisi baik dan siap digunakan.

Tabel 2.6
Jumlah Satuan Pendidikan kewenangan Dinas Pendidikan
Kota Solok Tahun 2025

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Satuan)
1	KB (Kelompok Belajar)	40
2	TK	19
3	TPA	6
4	SD	48
5	SMP	10
6	PKBM dan SKB	2
TOTAL		125

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Solok, 2025

Berdasarkan tabel diatas, jumlah satuan pendidikan pada berbagai jenjang kewenangan Dinas Pendidikan Kota Solok mencapai 125 satuan, yang terdiri atas 40 Kelompok Belajar (KB), 19 Taman Kanak-Kanak (TK), dan 6 Tempat Penitipan Anak (TPA) sebagai bagian dari layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pada jenjang pendidikan dasar, terdapat 48 Sekolah Dasar (SD) dan 10 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi pilar utama penyelenggaraan layanan pendidikan formal. Selain itu, terdapat 2 satuan PKBM dan SKB yang menyediakan layanan pendidikan kesetaraan dan nonformal. Komposisi ini mencerminkan penyebaran dan ketersediaan layanan pendidikan yang cukup beragam untuk mendukung akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

C.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

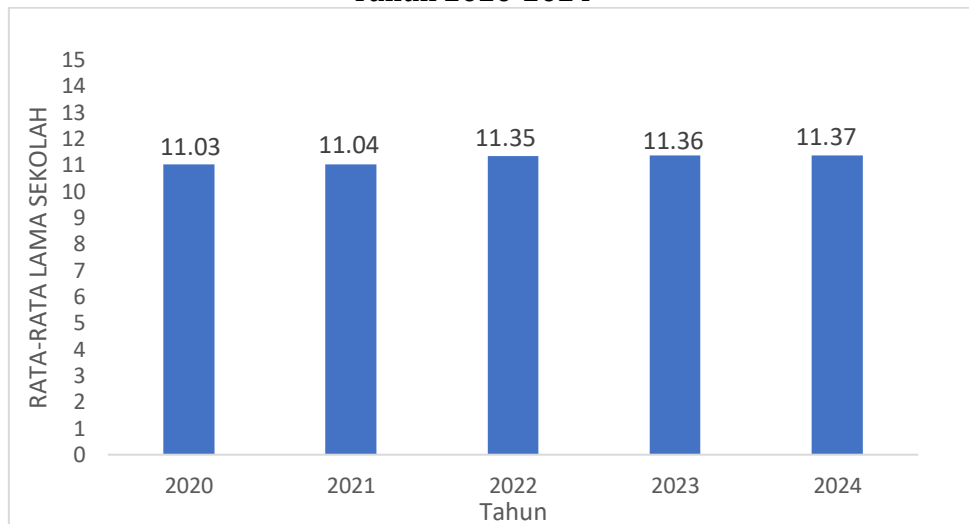
Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Solok dalam periode sebelumnya merupakan cerminan dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan. Dinas Pendidikan Kota Solok berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.

Evaluasi terhadap kinerja pelayanan selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya berbagai capaian positif, baik dari sisi peningkatan akses pendidikan, mutu pembelajaran, maupun tata kelola kelembagaan pendidikan.

Indikator makro pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah menunjukkan tren peningkatan yang menggambarkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah yang terus meningkat menandakan bahwa penduduk Kota Solok semakin lama menikmati pendidikan, sementara Harapan Lama Sekolah mencerminkan semakin besarnya peluang generasi muda untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, berikut gambaran capaian Rata-rata Lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Solok Tahun 2020-2024.

Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Indikator ini mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia, sekaligus menggambarkan akses dan kesempatan masyarakat terhadap layanan pendidikan.

Grafik.2.1
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Solok
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 - 2024

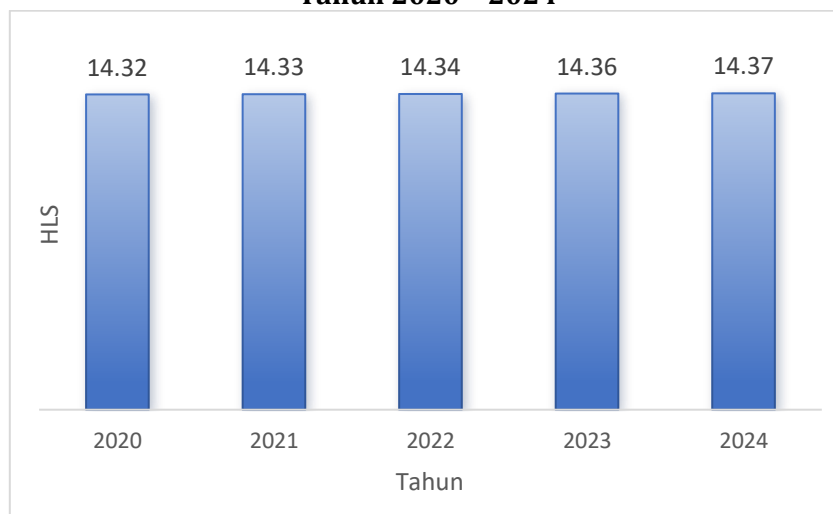
Berdasarkan grafik diatas Rata-Rata Lama Sekolah Kota Solok mengalami peningkatan meskipun laju peningkatannya relatif lambat, pada tahun 2020 sebesar 11,03 kemudian meningkat menjadi 11,37 pada tahun 2024, dapat diasumsikan sampai tahun 2024 rata-rata lama sekolah yang sudah ditempuh penduduk Kota Solok yang berumur 15 tahun keatas sudah setingkat kelas XI atau 2 SLTA.

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Solok adalah ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, adanya akses yang lebih luas ke tiap jenjang pendidikan, program wajib belajar yang diimplementasikan dengan baik, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal serta program-program pendidikan yang membantu meringankan beban masyarakat seperti beasiswa bagi siswa tidak mampu.

Selanjutnya lambatnya peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Solok dari tahun 2020 sampai 2024 disebabkan belum optimalnya penanganan terhadap anak-anak usia sekolah yang sudah putus sekolah serta tingginya arus urbanisasi dan perpindahan penduduk ke Kota Solok, anak-anak dari keluarga migran kerap tidak melanjutkan sekolah karena proses administrasi, kurangnya dokumen resmi atau ketidakmampuan finansial sehingga menyebabkan sebagian anak usia sekolah harus membantu mencari nafkah, baik dengan bekerja informal maupun membantu usaha keluarga.

Harapan Lama Sekolah adalah indikator makro yang mencerminkan proyeksi rata-rata lama pendidikan yang kemungkinan besar akan ditempuh oleh anak pada usia tertentu di masa depan. Nilai Harapan Lama Sekolah memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan dan peluang masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Grafik. 2.2
Harapan Lama Sekolah Kota Solok
Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 - 2024

Angka Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Solok selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun lajunya masih relatif lambat. Pada tahun 2020, nilai HLS tercatat sebesar 14,32 tahun, dan meningkat menjadi 14,37 tahun pada tahun 2024. Capaian tersebut mencerminkan bahwa, dengan kondisi Kota Solok saat ini, rata-rata anak memiliki peluang untuk menempuh pendidikan formal hingga sekitar 14 tahun atau setara dengan jenjang Diploma II–III.

Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Solok didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah daerah yang mendukung perluasan akses pendidikan, program beasiswa atau bantuan pendidikan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun, lambatnya peningkatan HLS setiap tahun tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan lembaga pendidikan, tetapi juga oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Anak-anak dari keluarga rentan sering menghadapi hambatan dalam melanjutkan pendidikan formal, sementara rendahnya relevansi antara pendidikan dan dunia kerja turut mengurangi minat sebagian anak untuk melanjutkan sekolah, karena mereka lebih memilih bekerja atau menempuh jalur alternatif.

Selanjutnya dari segi mutu, capaian mutu Pendidikan salah satunya dapat dilihat dari hasil asesment nasional terhadap kemampuan literasi dan numerasi. Berdasarkan data Rapor Pendidikan yang bersumber dari akun *belajar.id* Kemendikbudristekdikti, capaian hasil Asesmen Nasional untuk kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Kota Solok pada periode 2021–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Angka Literasi dan Numerasi Jenjang SD dan SMP
Kota Solok Tahun 2021 - 2024

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
1.	Literasi					
	- SD	%	72,61	78,81	85,91	80,06
	- SMP	%	76,96	84,85	80,37	86,34
2.	Numerasi					

- SD	%	37,67	56,81	68,87	74,04
- SMP	%	55,41	60,3	77,26	83,14

Sumber : Rapor Pendidikan, Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan Pendidikan Tinggi, 2022-2025

Berdasarkan data capaian kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama periode tahun 2021 hingga 2024, secara umum menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan ini kemungkinan merupakan hasil dari penguatan pembelajaran dari literasi dan numerasi, peningkatan kapasitas guru, serta dukungan kebijakan yang tepat sasaran.

Capaian Kinerja Kunci Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat diharapkan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Berikut gambaran capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan Tahun 2020-2024:

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan
Kota Solok Tahun 2020 - 2024

No.	INDIKATOR	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	86,44	86,2	103,8	100,52	118,83
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	64,99	68,71	121,3	117,36	141,42
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	1,5	0,94	0,94	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	83,59	43,7	36,19	48,5	72,51

Sumber: LPPD Kota Solok, 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat perkembangan capaian indikator pendidikan tahun 2020 – 2024. Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun dalam PAUD menunjukkan tren fluktuatif yaitu sebesar 83,59% di tahun 2020 menjadi 72,51% pada 2024. Dengan penurunan yang cukup besar pada periode 2021–2022 hal ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat akses terhadap layanan PAUD. Selanjutnya tingkat partisipasi pendidikan dasar (usia 7–12 tahun) dan pendidikan menengah pertama (usia 13–15 tahun) menunjukkan peningkatan sehingga pada tahun 2024 sudah melebihi angka 100%. Angka partisipasi yang melebihi 100% ini disebabkan adanya peserta didik dari luar daerah atau luar kelompok usia sasaran sehingga adanya ketidaksesuaian data dasar jumlah anak pada kelompok usia tersebut. Pada Pendidikan kesetaraan untuk warga usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari 1,5% pada 2020 menjadi 100% pada tahun 2023 dan 2024.

Selanjutnya untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan dasar di Kota Solok, dapat juga dilihat dari : Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berikut perkembangan APS, APK dan APM Kota Solok pada jenjang pendidikan dasar tahun 2020 – 2024:

Tabel 2.9
Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Solok Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
	- APS 7-12 tahun	%	99,99	99,7	99,69	99,95	99,76
	- APS usia 13-15 tahun	%	96,96	97,2	96,89	96,85	96,03
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
	- APK SD	%	103,76	101,61	103,66	104,41	102,81
	- APK SMP	%	101,82	102,7	106,41	107,5	100,8
3	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	- APM SD	%	92,75	92,33	94,01	94,04	93,84
	- APM SMP	%	79,14	79,24	82,8	82,52	80,56

Sumber: BPS dan Kemendikbudristekdikti, 2020-2024

Berdasarkan data diatas, Perkembangan APS usia 7–12 tahun dan usia 13–15 tahun, relatif stabil di atas 96%, hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia SD dan SMP telah terakomodasi dalam sistem pendidikan. Pada APK perkembangan juga relatif stabil diman capaian nya APK SD dan SMP dari tahun 2020-2024 sudah melebihi 100%. Selanjutnya, Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukan kesesuaian antara siswa usia sekolah dengan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Rata-rata APM SD berkisar antara 92 - 94% dan SMP berkisar antara 79-83%.

Dari perbedaan angka APK dan APM baik di tingkat SD maupun SMP hal ini dapat diartikan masih terdapat siswa yang bersekolah di jenjang SD yang tidak sesuai dengan umur 7-12 tahun dan SMP yang tidak sesuai dengan umur 13-15 tahun serta ditambah faktor-faktor lain seperti Penduduk Kota Solok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah diluar kota yang tidak terdata serta masih adanya anak tidak bersekolah/putus sekolah.

Akreditasi Sekolah

Untuk mencapai pelayanan yang baik terhadap penyelenggaraan PAUD/SD/SMP/Kesetaraan, maka diperlukan akreditasi PAUD/SD/SMP/Kesetaraan. Akreditasi PAUD/SD/SMP/Kesetaraan sebagai upaya meningkatkan kualitas mutu dan layanan terhadap anak - anak yang dalam proses berkembang. Di Kota Solok PAUD/SD/SMP/Kesetaraan yang terakreditasi pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren kenaikan, sekitar 93,87%.

Tabel 2.10
Persentase PAUD/SD/MI/SMP/MTs yang terakreditasi
di Kota Solok Tahun 2020- 2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	TK /RA yang terakreditasi	%	77,27	77,27	85,43	85,43	99,15
2.	SD/MI	%	58,53	50,00	61,33	61,33	90,19
3.	SMP/MTs	%	62,50	62,50	80,00	80,00	80,00

Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Solok

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten menjadi prioritas utama. Pada tahun 2024, persentase guru SD di Kota Solok yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan berstatus layak mengajar mencapai 97,30 persen, sedangkan pada jenjang SMP mencapai 96,43 persen.

Sementara itu, pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), ketersediaan guru berkualifikasi S1/D-IV masih menghadapi tantangan. Sebagian guru PAUD masih berlatar belakang pendidikan di bawah S1/D-IV, baik lulusan SMA sederajat maupun Diploma II/III, sehingga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kondisi ini berdampak pada mutu layanan pembelajaran, terutama dalam aspek pedagogik, metodologi pengajaran dan penguasaan kurikulum yang diperlukan dalam mendidik anak usia dini.

Secara terperinci kinerja upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Solok dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.11
Perkembangan Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
Memenuhi Kualifikasi dan Layak Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase guru TK/RA yang layak mengajar (memenuhi kualifikasi S1/ D4)	%	70,00	75,00	75,00	80,00	85,00
2.	Persentase guru SD/MI yang layak mengajar (memenuhi kualifikasi S1/ D4)	%	98,57	98,00	98,00	98,00	98,00
3.	Persentase guru SMP/MTs yang layak mengajar (memenuhi kualifikasi S1/ D4)	%	95,00	95,00	96,00	96,00	96,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Solok

Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Indikator ini menggambarkan jumlah peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang sama atau lebih tinggi dalam satu tahun ajaran tertentu. Tingginya angka putus sekolah mencerminkan adanya permasalahan dalam akses, kualitas, maupun keberlanjutan layanan pendidikan.

Secara umum, angka putus sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya motivasi belajar, kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran, serta kurangnya dukungan lingkungan sekolah yang kondusif. Sementara faktor eksternal meliputi kondisi sosial ekonomi keluarga, jarak dan ketersediaan sarana pendidikan, pernikahan usia dini, serta tuntutan ekonomi yang menyebabkan anak harus bekerja untuk membantu keluarga.

Di wilayah perkotaan, meskipun akses terhadap fasilitas pendidikan relatif lebih baik, permasalahan putus sekolah masih dapat ditemukan, terutama pada keluarga berpenghasilan rendah atau pada lingkungan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang belum optimal. Di sisi lain, di wilayah pinggiran atau daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, keterbatasan sarana, prasarana, dan layanan pendidikan turut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko anak tidak melanjutkan sekolah.

Upaya penurunan angka putus sekolah perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pendidikan, berperan penting dalam memperkuat program wajib belajar, meningkatkan pemerataan akses pendidikan, memperluas bantuan biaya pendidikan seperti program beasiswa dan PIP (Program Indonesia Pintar), serta mengembangkan layanan pendidikan alternatif bagi

anak-anak yang telah terlanjur keluar dari sistem pendidikan formal. Selain itu, dukungan dari masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial menjadi faktor pendukung penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Penurunan angka putus sekolah bukan hanya target kuantitatif, tetapi juga cerminan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Tabel 2.12
Angka Putus Sekolah
Kota Solok Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Solok

Capaian Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada bidang pendidikan di Kota Solok tahun 2020-2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini (usia 5-6 tahun)	84,89	53,10	83,94	100	100
2	Pendidikan Dasar (Usia 7-15 tahun)	88,46	98,86	104	99,97	100
3	Pendidikan kesetaraan (7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah)	0,94	95,25	89,69	100	100

Sumber : LPPD Kota Solok, Tahun 2020-2024

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan bertujuan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai permasalahan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal, seperti :

1. Belum maksimalnya pengumpulan data khususnya verifikasi anak tidak sekolah (ATS) karena masih belum terintegrasinya data Kependudukan, Data Pokok Pendidikan dan Data Pokok Pendidikan yang dibawah Kementerian Agama.
2. Masih terbatasnya pelayanan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus
3. Belum tersedianya hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar secara keseluruhan.
4. Belum samanya persepsi pejabat pelaksana teknis yang terkait langsung dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Dengan mengatasi permasalahan ini melalui langkah - langkah strategis, penerapan SPM di bidang pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat layanan pendidikan yang berkualitas dan merata sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Capaian Pelaksanaan Urusan Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan diarahkan pada pengelolaan kekayaan budaya daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman sejarah, perlindungan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan nilai tradisional serta pelestariannya. Berikut tabel pelaksanaan urusan kebudayaan tahun 2020-2024:

Tabel 2.14
Pelaksanaan Urusan Kebudayaan Kota Solok Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Cagar Budaya	9	9	9	9	14

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Solok, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan jumlah benda, situs budaya dan benda cagar budaya yang dilindungi hingga tahun 2024 sebanyak 14 (empat belas) benda. Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Solok diantaranya Mimbar Masjid Lubuak Sikarah, Stasiun Kereta Api, Gedung SMPN 1 Kota Solok, Pincuran Gadang, Surau Gudang, Makam Syech Ismail, Rumah Gadang Gajah Maharam, Surau Latiah dan, Makam Syech Sialahan.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Belum optimalnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan

Belum optimalnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan yang dapat diakses oleh semua masyarakat terlihat dari :

- a. Angka partisipasi Pendidikan pada jenjang PAUD usia 5-6 tahun yang masih rendah dimana pada tahun 2024 baru mencapai 72,51%. Sedangkan APS PAUD usia3-6 hanya 44,68%
- b. Belum tercapainya 100% sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar minimal. ketersediaan fasilitas sanitasi dasar sekolah yang belum memadai, ketersediaan dan kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik yang belum mencapai 100% serta ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran yang belum terpenuhi untuk setiap sekolah.

- c. Masih terdapat satuan pendidikan yang belum terakreditasi terutama di tingkat PAUD yang merupakan salah satu indikator pencapaian SPM dimana standar akreditasi untuk PAUD adalah akreditasi B. Tahun 2024 PAUD yang sudah terakreditasi A dan B baru hanya 29,23%
- d. Kualitas tenaga pendidik masih belum merata, pada tahun 2023 persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi baru mencapai sekitar 44,6%.
- e. masih rendahnya capaian standar mutu kompetensi minimal kemampuan Numerasi siswa dan satuan pendidikan di Kota Solok. Persentase siswa SD yang memenuhi standar kompetensi minimum Numerasi hanya 74,04%, dan yang memenuhi standar minimum literasi 80,06%. Persentase siswa SMP yang memenuhi standar kompetensi minimum Numerasi hanya 83,14%, dan yang memenuhi standar minimum literasi 86,34%.
- f. Masih adanya anak tidak sekolah, sesuai data yang ada pada Pusdatin Kemendikdasmen kondisi Juli 2025 tercatat sebanyak 634 anak usia 7-18 tahun di Kota Solok yang tidak bersekolah.
- g. Masih adanya siswa SD dan SMP yang belum bisa dan belum lancar baca tulis Alquran yaitu sebesar 32% belum bisa dan belum lancar baca tulis Alquran.

2. Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan potensi budaya

Masyarakat Minangkabau saat ini menghadapi permasalahan yang mengancam kelestarian nilai-nilai adat dan budaya mereka. Berkurangnya regenerasi pelestarian tradisi dan fungsi lembaga adat menjadi salah satu tantangan utama, karena generasi muda semakin kurang terlibat dalam kegiatan adat dan tidak lagi memahami makna filosofis di balik tradisi yang diwariskan. Selain itu, pengelolaan aset budaya yang belum optimal menyebabkan banyak warisan budaya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, tidak terawat dengan baik dan rawan punah. Di sisi lain, integrasi nilai-nilai lokal dalam sistem pendidikan dan kehidupan sosial juga semakin melemah, sehingga pelajar dan masyarakat umum tidak lagi mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pentingnya adat dan budaya dalam membentuk karakter dan jati diri. Selain itu, pengaruh globalisasi dan budaya luar turut mempercepat pergeseran nilai dalam masyarakat, menjadikan budaya lokal dianggap kuno dan kurang relevan, sehingga prinsip "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Minangkabau kian terpinggirkan dalam praktik sehari-hari.

TABEL 2.15
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tersedianya Lembaga/ satuan pendidikan dari jenjang PAUD, Pendidikan dasar dan menengah di seluruh kecamatan dan kelurahan 2. Tersedianya tenaga pendidik dengan latar belakang akademik	Belum optimalnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan	Maraknya perkembangan penyakit sosial (pergaulan bebas,LGBT, narkoba, kekerasan anak, judi)	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) : Tujuan ke-4. Menjamin kualitas pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (Pendidikan Berkualitas)	Asta Cita 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas Kondisi isu strategis kondisi GTK di antaranya adalah status kepegawaian, sertifikasi pendidik, kualifikasi akademik, distribusi, indeks pemerataan guru, kompetensi guru. Salah satu isu strategis utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional saat ini adalah menurunnya tingkat	Disparitas kualitas sumber daya manusia dan <i>brain/talent drain</i> , angka partisipasi sekolah jenjang menengah atas/kejurusan (70 persen) dan pendidikan tinggi (25 persen) di Sumatera masih relatif senjang, ditambah terjadinya <i>brain/talent drain</i> pada tenaga kerja ahli dan terampil (30 persen) (2023)	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

				pemerataan distribusi guru		
Tersedianya Cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan potensi budaya			Pemajuan Kebudayaan	Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan potensi budaya daerah	Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan potensi budaya

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025–2029 didasarkan pada kebutuhan untuk menghadirkan arah pembangunan pendidikan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Renstra ini menjadi pedoman strategis bagi Dinas Pendidikan Kota Solok dalam mengarahkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan agar berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok Tahun 2025–2029.

Secara substantif, tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok mencakup beberapa aspek pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak dan bermutu, sehingga tidak terdapat kesenjangan antarsekolah maupun antar wilayah.
2. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan melalui penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pembaruan kurikulum, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan perkembangan global.
3. Memperkuat tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dengan menerapkan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan Pendidikan.
4. Mendorong kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat serta dunia usaha dan industri dalam rangka memperluas dukungan terhadap pengembangan pendidikan, baik melalui peningkatan pendanaan, penyediaan sarana prasarana, maupun pelaksanaan program pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif.
5. Mengembangkan budaya, karakter, dan kreativitas peserta didik berlandaskan nilai-nilai agama, moral, dan kearifan lokal, guna membentuk

generasi yang berintegritas, produktif, inovatif, serta adaptif terhadap perubahan zaman.

6. Menjaga dan melestarikan berbagai unsur kebudayaan daerah agar tidak punah atau hilang oleh perkembangan zaman (Aspek perlindungan)
7. Melakukan pengembangan budaya yang berorientasi pada peningkatan kreativitas, produktivitas, dan inovasi budaya agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman
8. Menekankan bagaimana hasil kebudayaan dapat memberi manfaat sosial, ekonomi, dan pendidikan bagi Masyarakat (Pemanfaatan Kebudayaan)
9. Melakukan pembinaan dan pewarisan nilai budaya yang berfokus pada pelestarian nilai-nilai luhur dan karakter bangsa yang bersumber dari kebudayaan lokal
10. Pelestarian warisan budaya dan identitas daerah dengan mendorong pemahaman terhadap identitas budaya lokal sebagai bagian dari kekuatan karakter daerah

Dengan demikian, tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok tidak hanya berfokus pada pemenuhan target administratif pembangunan daerah, tetapi juga memiliki makna strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter, sebagai fondasi utama mewujudkan **Kota Solok yang Maju, Berkarakter, dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera**

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Sat	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan 2. Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan serta pemajuan kebudayaan daerah		Rata-Rata Lama Sekolah	Thn	11,37	11,58	11,67	11,77	11,86	11,95	12,04	
			Harapan Lama Sekolah	Thn	14,37	14,52	14,60	14,69	14,77	14,85	14,93	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Persen	56	57	58	59,03	60,01	60,58	61	
		Meningkatnya pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Angka	79,28	81,07	82,85	84,64	86,43	88,21	90	

			Persentase satuan pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi)	Persen	66,27	77,27	78	79	80	81,82	82	
			Persentase satuan pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi)	Persen	50,60	51,14	53	54	55	56,82	58	
		Meningkatnya Kualitas Pemajuan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	70	75	85	87	93	95	95,57	
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Angka	75,15	76,40	77,65	78,90	80,15	81,40	82,65	

			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan	Angka	82,65	83,00	86,00	86,50	87,00	88,00	88,50	
			Indeks Pelayanan Publik Dinas Pendidikan	Indeks	0	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	4,15	

3.2 Strategi Dinas Pendidikan Kota Solok dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025 - 2029

Strategi pembangunan pendidikan di Kota Solok diarahkan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dinas Pendidikan Kota Solok menempatkan peningkatan mutu sumber daya manusia sebagai prioritas utama melalui penyediaan layanan pendidikan yang adil, terjangkau, dan berdaya saing.

Beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Solok dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemerataan Akses Pendidikan

- Melakukan pendataan akurat anak usia sekolah dan anak tidak sekolah (by name, by address) untuk memastikan seluruh anak memperoleh layanan pendidikan.
- Meningkatkan daya tampung dan sebaran satuan pendidikan, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikan dasar dan PAUD.
- Memberikan bantuan pendidikan seperti beasiswa, seragam gratis, transportasi sekolah, dan dukungan untuk keluarga miskin agar tidak ada anak putus sekolah.
- Mengembangkan program sekolah satu atap di wilayah dengan keterbatasan sarana pendidikan jenjang lanjutan.
- Mendorong pendidikan inklusif, memastikan peserta didik berkebutuhan khusus mendapat layanan dan fasilitas yang memadai.

2. Penguatan Tata Kelola dan Kemitraan

- Digitalisasi tata kelola pendidikan berbasis data dan teknologi, memastikan pengambilan keputusan yang akurat dan transparan.
- Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pembiayaan, sarana, dan program pendidikan.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal, baik melalui kegiatan pendidikan formal maupun nonformal.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pemerataan dan kualitas layanan pendidikan serta program kebudayaan.

3. Penguatan Pendidikan Kesetaraan dan Nonformal

- Memperkuat peran PKBM dan LKP dalam memberikan layanan pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan vokasional.
- Mengembangkan program kecakapan hidup (life skills) berbasis potensi lokal, seperti kewirausahaan, pertanian, atau ekonomi kreatif.
- Mengintegrasikan pembelajaran nonformal dengan sistem digital (e-learning kesetaraan) untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses pendidikan formal.

- Melakukan akreditasi dan pembinaan terhadap lembaga nonformal untuk menjamin mutu layanan dan kelayakan pembelajaran.

4. Fokus Transformasi 2025–2029

- Peningkatan APK PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan secara merata di seluruh wilayah Kota Solok.
- Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran dan manajemen pendidikan.
- Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik agar selaras dengan tuntutan kurikulum merdeka dan kebutuhan masa depan.
- Penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pendidikan inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

5. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah

- Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
- Mendorong kegiatan pelestarian seni, tradisi, dan adat lokal melalui festival budaya, lomba kreativitas seni, dan muatan lokal berbasis budaya Solok.
- Memperkuat peran sanggar seni, lembaga adat, dan komunitas budaya dalam pelestarian warisan budaya benda dan tak benda.
- Meningkatkan literasi budaya dan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran kontekstual berbasis budaya daerah.
- Mengembangkan sistem dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya daerah agar terjaga dan mudah diakses oleh generasi muda

Tabel 3.2
Penahapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 20230
Penguatan Dasar (Baseline & Akses Awal)	Peningkatan Kualitas Dasar	Percepatan Inovasi	Penguatan Mutu dan Relevansi	Kemandirian dan Keberlanjutan
1. Pendataan ulang anak usia sekolah dan PAUD (by name, by address) 2. Perluasan akses PAUD di daerah yang belum terjangkau 3. Perluasan APK SD/SMP melalui sekolah satu atap 4. Pemetaan mutu sekolah	1. Implementasi kurikulum merdeka belajar pada PAUD, SD, SMP 2. Penguatan literasi dan numerasi berbasis asesmen 3. Rehabilitasi sarana sekolah dasar dan PAUD yang rusak berat 4. Pengembangan PKBM untuk layanan anak putus sekolah	1. Digitalisasi pembelajaran PAUD dan SD (akses internet, konten digital) 2. Pengembangan sekolah model (PAUD Holistik-Integratif, Sekolah Ramah Anak) 3. Program inklusi untuk ABK di sekolah dasar dan PAUD 4. Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya	1. Sinkronisasi kurikulum PNF dengan kebutuhan keterampilan vokasional dasar 2. Kerja sama dunia usaha/komunitas untuk kursus keterampilan 3. Monitoring & evaluasi capaian mutu pendidikan dasar & PAUD 4. Peningkatan	1. Kemandirian satuan pendidikan melalui penguatan manajemen berbasis sekolah 2. PAUD & SD menerapkan konsep “sekolah berkelanjutan” (green school & ramah lingkungan) 3. Integrasi layanan

dasar dan PAUD 5. Peningkatan kapasitas guru PAUD, SD, SMP tahap awal	5. Pelatihan berjenjang bagi guru PAUD/SD/SMP	lokal	manajemen sekolah berbasis data	PAUD-SD secara mulus (transisi PAUD ke SD) 4. Evaluasi dan penyusunan roadmap pendidikan pasca-2030
Konsolidasi & Pendataan Dasar Kebudayaan Daerah	Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Kebudayaan	Pengembangan & Revitalisasi Program Kebudayaan Daerah	Pemanfaatan & Sinergi Kebudayaan dalam Pembangunan Daerah	Kemandirian Inovasi, dan Keberlanjutan Ekosistem Kebudayaan
1. Pelindungan Kebudayaan 2. Pengelolaan & Dokumentasi Kebudayaan	1. Pengembangan Kebudayaan 2. Pengelolaan & Dokumentasi Kebudayaan	1. Pengembangan Kebudayaan 2. Pelestarian Warisan Budaya	1. Pemanfaatan Kebudayaan 2. Pembinaan Nilai Budaya	1. Infrastruktur & Ekosistem Kebudayaan 2. Kerja Sama & Jejaring Kebudayaan

3.3 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Solok dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Solok menekankan pada tiga aspek utama. Pertama, peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan mendorong inovasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta pemanfaatan teknologi digital. Kedua, pemerataan dan perluasan akses pendidikan melalui pembangunan sarana prasarana yang memadai, penyediaan program beasiswa, serta perhatian khusus pada kelompok rentan. Ketiga, penguatan tata kelola dan manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip good governance, transparansi anggaran, serta sistem evaluasi berbasis kinerja.

Dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Solok berkomitmen mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan global, sekaligus mendukung tercapainya visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan serta kebudayaan sesuai dengan visi daerah, arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Solok tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan, pemerataan dan perluasan akses pendidikan, penguatan tata kelola dan manajemen pendidikan.

Arah kebijakan ini menekankan pada pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, penguatan tata kelola kelembagaan pendidikan, serta pengembangan kebudayaan daerah sebagai identitas dan daya saing bangsa.

Secara garis besar, arah kebijakan yang ditempuh antara lain:

1. Peningkatan Akses Pendidikan

- Memperluas daya tampung dan pemerataan layanan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- Menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi kelompok rentan, termasuk anak dari keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus.

2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kompetensi Guru

- Peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, penguasaan teknologi pembelajaran, serta penguatan pendidikan karakter.
- Pengembangan kurikulum yang adaptif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan daerah serta perkembangan zaman.

3. Meningkatkan transformasi digital di bidang pendidikan

- Pengembangan Sistem Pembelajaran Berbasis E-Learning
 - **Pengembangan Platform:** Membangun dan mengembangkan platform e-learning yang terintegrasi, mudah diakses, dan ramah pengguna bagi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
 - **Konten Digital Berkualitas:** Menyediakan konten pembelajaran digital yang interaktif, inovatif, dan sesuai kurikulum serta karakteristik peserta didik.
 - **Integrasi Data Pendidikan:** Mengintegrasikan data peserta didik, guru, dan materi pembelajaran untuk memudahkan pemantauan, evaluasi, dan personalisasi pembelajaran.
- Pemanfaatan Perangkat TIK dalam Kegiatan Belajar Mengajar
 - **Penyediaan Infrastruktur:** Menyediakan sarana TIK, seperti komputer, proyektor, tablet, laboratorium komputer, dan akses internet memadai di sekolah
 - **Pengembangan Pembelajaran Hybrid:** Mengimplementasikan metode pembelajaran campuran (*blended learning*) yang memadukan tatap muka dan daring
 - **Pemanfaatan Aplikasi Pendidikan:** Mendorong penggunaan aplikasi pembelajaran, kuis interaktif, dan simulasi digital untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman peserta didik
- Peningkatan Kompetensi Literasi Digital
 - **Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan:** Menyelenggarakan program pelatihan literasi digital, penggunaan platform e-learning, manajemen pembelajaran daring, dan keamanan siber.
 - **Pembinaan Peserta Didik:** Mengajarkan keterampilan literasi digital sejak dini, termasuk kemampuan mencari, menilai, dan menggunakan informasi secara kritis.
 - **Sertifikasi dan Penghargaan:** Memberikan sertifikasi kompetensi digital bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mendorong profesionalisme
- Penciptaan Ekosistem Pembelajaran Digital yang Adaptif dan Inovatif

- **Kolaborasi Lintas Sektor:** Bekerja sama dengan penyedia teknologi, perguruan tinggi, dan komunitas inovasi pendidikan untuk pengembangan konten dan metode pembelajaran
- **Monitoring dan Evaluasi Digital:** Menggunakan sistem monitoring berbasis TIK untuk menilai efektivitas pembelajaran digital, serta memperbaiki dan menyesuaikan strategi pembelajaran secara real-time.
- **Inovasi Berkelanjutan:** Mendorong sekolah untuk mengembangkan *learning lab*, *maker space*, dan inovasi pembelajaran berbasis teknologi untuk membangun budaya belajar kreatif dan berdaya saing

4. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Terkait Literasi Dan Numerasi

- **Menguatkan pembelajaran literasi dan numerasi** melalui metode aktif, kontekstual, dan penyediaan bahan ajar yang sesuai
- **Meningkatkan kompetensi guru** lewat pelatihan, pendampingan, dan komunitas belajar
- **Menerapkan asesmen berbasis data** (diagnostik, AN/AKM) untuk menentukan intervensi pembelajaran
- **Mengembangkan budaya literasi sekolah** melalui Gerakan Literasi Sekolah, peningkatan bahan bacaan, dan kegiatan inovatif
- **Mendorong kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat** dalam mendukung kegiatan literasi-numerasi
- **Memanfaatkan teknologi digital** untuk pembelajaran interaktif literasi dan numerasi
- **Melakukan intervensi khusus** bagi sekolah dan siswa dengan capaian rendah melalui program remedial dan pendampingan
- **Penguatan** penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan potensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini
- **Peningkatan** bahan ajar dan bahan belajar yang berkualitas, aman dan berisi ilmu pengetahuan yang kaya untuk penguatan pengetahuan peserta didik dan mendukung proses belajar dan mengajar yang berkualitas
- **Peningkatan** digitalisasi pembelajaran, untuk meningkatkan akses bahan ajar dan belajar yang lebih kaya dan berwawasan luas, pembelajaran yang lebih fleksibel, peningkatan kemampuan digital dalam menyiapkan generasi muda yang lebih siap dan cakap mengikuti perkembangan teknologi

5. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pendidikan

- Optimalisasi perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis kinerja.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan untuk mendorong transparansi dan efektivitas pelayanan publik.

6. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah

- Perlindungan warisan budaya daerah serta penguatan identitas lokal melalui kegiatan seni, adat, dan tradisi.
- Pengembangan ekosistem kebudayaan yang mendukung kreativitas, inovasi, dan ekonomi kreatif berbasis budaya.

7. Sinergi dan Kolaborasi

- Memperkuat koordinasi dengan lintas perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
- Mendorong partisipasi masyarakat serta kemitraan strategis dalam pengelolaan pendidikan dan pelestarian budaya.

Dengan arah kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Solok menargetkan tercapainya peningkatan angka partisipasi sekolah, kualitas hasil belajar peserta didik, peningkatan jumlah sekolah terakreditasi baik, serta terjaganya nilai-nilai budaya daerah. Hal ini diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta memiliki karakter berbudaya sesuai tujuan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025–2029.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok	Ket
1	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan terhadap Anak Tidak Sekolah	Penguatan pendataan dan identifikasi ATS, peningkatan akses layanan pendidikan, penguatan program pencegahan, kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sekolah dan tenaga pendidik, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara terpadu.	
2	PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (dan perubahannya).	Pemerataan Sebaran dan ketersediaan Satuan Pendidikan di setiap wilayah	Pemerataan pembangunan dan penyediaan satuan pendidikan beserta sarpras dan tenaga pendidiknya di seluruh wilayah secara tepat sasaran.	
3	Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Perluasan dan penguatan kualitas layanan pendidikan usia dini	Perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan PAUD melalui penguatan lembaga, peningkatan kompetensi pendidik, penyediaan sarpras yang memadai, serta pembinaan dan akreditasi berkelanjutan	
4	Peraturan teknis Kemendikbudristek terkait Standar Pendidikan, Kurikulum, GTK, serta Sarpras.	Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Pemerataan penempatan serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui redistribusi, rekrutmen berbasis kebutuhan, dan pengembangan profesional berkelanjutan di seluruh wilayah.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok	Ket
		Meningkatkan pelaksanaan pendidikan inklusi dengan program inklusi, pemerataan tenaga pendidik yang kompeten serta fasilitas pendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus	Memperluas dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusi melalui peningkatan kapasitas program inklusi, pemerataan tenaga pendidik yang kompeten, serta penyediaan fasilitas pendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus.	
		Mengembangkan pendidikan non formal yaitu pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan kecakapan hidup serta pemberdayaan komunitas belajar untuk mendukung peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat	Memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan nonformal melalui penguatan program kesetaraan, kursus dan pelatihan kecakapan hidup, serta pemberdayaan komunitas belajar untuk mendukung peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat	
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas sesuai standar mutu pendidikan.	
		Optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan dengan memastikan ketersediaan fasilitas belajar yang layak, laboratorium, perpustakaan, perangkat TIK serta akses internet di sekolah	Pemenuhan fasilitas belajar yang layak, laboratorium, perpustakaan, perangkat TIK, serta akses internet di seluruh satuan pendidikan.	
		Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan mengembangkan sistem pembelajaran digital (elearning), penggunaan perangkat TIK dalam proses belajar-mengajar, serta pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa	Meningkatkan transformasi digital di bidang pendidikan melalui pengembangan sistem pembelajaran berbasis e-learning, pemanfaatan perangkat TIK dalam kegiatan belajar mengajar, serta peningkatan kompetensi literasi digital bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik guna mewujudkan ekosistem pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di era digital.	
		Penguatan pendidikan karakter dan budaya melalui integrasi nilai-nilai keagamaan, moral dan etika dalam pembelajaran serta penumbuhan jiwa entrepreneur/kewirausahaan sejak dini	Menguatkan pendidikan karakter dan budaya melalui integrasi nilai-nilai keagamaan, moral, etika, dan kearifan lokal dalam kurikulum serta kegiatan pembelajaran, disertai dengan pengembangan jiwa kewirausahaan peserta didik sejak dini guna membentuk generasi yang berakhlak, mandiri, kreatif, dan berdaya saing.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok	Ket
		Penguatan kurikulum berbasis kompetensi guna meningkatkan relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman dan dunia kerja	Meningkatkan relevansi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pembangunan daerah, perkembangan teknologi, dan tuntutan dunia kerja melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran kontekstual, serta penguatan keterampilan abad 21 (critical thinking, creativity, collaboration, communication) bagi peserta didik.	
		Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kurikulum pendidikan	Mengoptimalkan implementasi kurikulum secara terpadu dan berkesinambungan melalui peningkatan kompetensi guru, penguatan supervisi akademik, penyediaan sarana pendukung pembelajaran, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.	
		Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat	Mendorong penguatan literasi masyarakat melalui pengembangan dan revitalisasi perpustakaan sekolah serta perpustakaan masyarakat, penyelenggaraan program literasi dan kampanye gemar membaca, serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menciptakan ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan.	
		Menyediakan instrumen kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan	Mengembangkan dan memperkuat instrumen kebijakan daerah di bidang pendidikan melalui penyusunan regulasi, pedoman teknis, serta mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang selaras dengan kebijakan nasional guna menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan kesinambungan penyelenggaraan pendidikan di Kota Solok.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok	Ket
		Penguatan tata kelola pendidikan berbasis data dan inovasi	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data melalui pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan, pemanfaatan teknologi digital dalam pengambilan keputusan, serta penerapan inovasi layanan pendidikan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan daerah.	
		Penguatan sistem informasi pendidikan daerah	Mengembangkan sistem informasi pendidikan daerah yang terintegrasi dan berorientasi pada digitalisasi pendidikan melalui optimalisasi basis data pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi untuk perencanaan dan evaluasi kinerja, serta penguatan kapasitas aparatur dan satuan pendidikan dalam penggunaan aplikasi digital guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis bukti.	
		Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan strategis antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perluasan akses serta peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pembiayaan, penyediaan sarana prasarana, dan program beasiswa, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam memperluas akses pembelajaran, mengembangkan platform edukasi daring, serta memperkuat ekosistem pendidikan berbasis digital yang inklusif dan berkelanjutan.	
		Pelestarian, pemanfaatan dan revitalisasi adat serta nilai kearifan lokal	Melestarikan, memanfaatkan, dan merevitalisasi adat serta nilai kearifan lokal secara komprehensif melalui pengembangan program pendidikan formal dan nonformal yang memasukkan muatan lokal, penyelenggaraan sosialisasi dan kampanye budaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, fasilitasi kegiatan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok	Ket
			seni dan tradisi adat yang melibatkan komunitas dan generasi muda, pendokumentasian dan publikasi adat serta kearifan lokal, pelatihan bagi tenaga pendidik dan pembina budaya, serta kolaborasi dengan lembaga adat, komunitas budaya, dan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan pelestarian budaya.	
		<p>Pemajuan kebudayaan daerah secara berkelanjutan</p> <p>Integrasi nilai agama, adat, dan budaya dalam pendidikan dan kehidupan sosial</p> <p>Peningkatan literasi dan kesadaran budaya di masyarakat</p>	<p>Memajukan kebudayaan daerah secara berkelanjutan melalui pelestarian, pengembangan, dan promosi seni, budaya, dan tradisi lokal yang melibatkan masyarakat luas</p> <p>Mengintegrasikan nilai agama, adat, dan budaya dalam pendidikan serta kehidupan sosial secara menyeluruh dengan langkah-langkah: pengembangan kurikulum yang memasukkan nilai-nilai agama, adat, dan budaya; penyelenggaraan program pembinaan karakter dan budi pekerti di sekolah dan lembaga pendidikan; pelatihan dan pendampingan guru serta tenaga kependidikan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut; fasilitasi kegiatan sosial budaya di komunitas dan sekolah; penguatan kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi masyarakat; serta monitoring dan evaluasi penerapan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sosial sehari-hari masyarakat</p> <p>Meningkatkan literasi dan kesadaran budaya masyarakat secara menyeluruh melalui pengembangan program pendidikan dan pembelajaran literasi budaya di sekolah, penyelenggaraan sosialisasi dan kampanye budaya di masyarakat, fasilitasi kegiatan seni dan budaya lokal, pemberdayaan komunitas adat dan budaya, serta pendokumentasian dan publikasi nilai-nilai kearifan lokal untuk memperkuat identitas dan partisipasi masyarakat</p>	

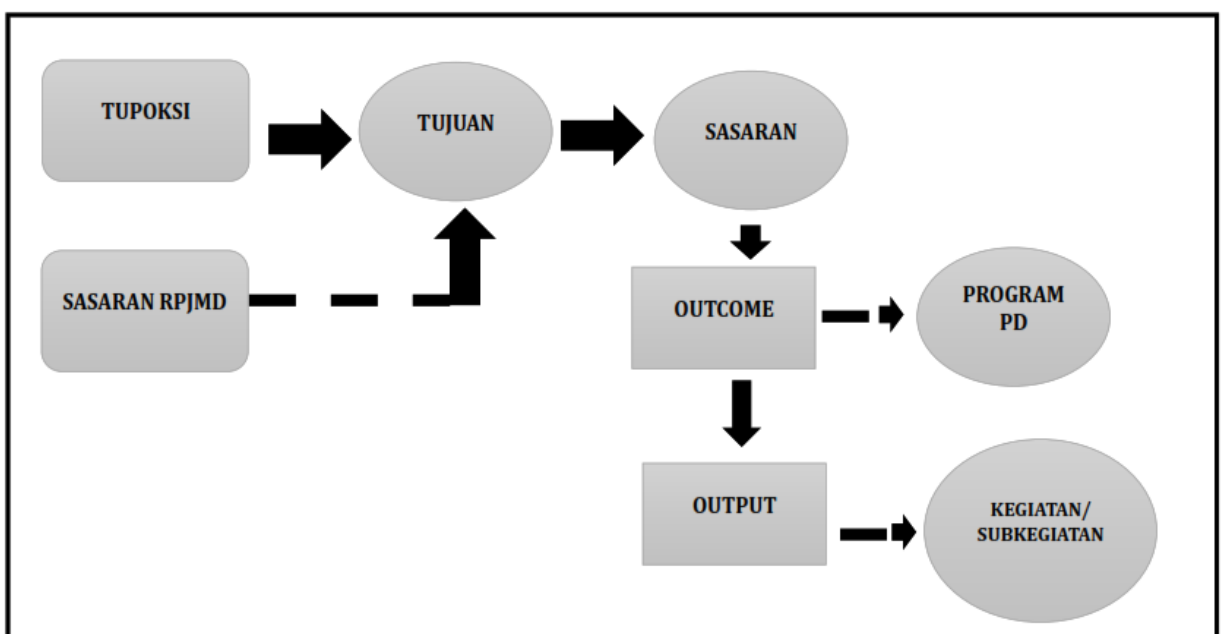
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Berdasarkan tujuan, sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025–2029). Langkah operasional tersebut meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. Seluruh program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Solok 2025–2029.

Program dan kegiatan menjadi penjabaran langsung dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh dinas pendidikan kota solok melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan beserta rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran maupun kegiatan, khususnya indikator hasil (outcome) dan indikator keluaran (output). Penyusunan program dan kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kebijakan penganggaran serta menggambarkan komitmen Dinas Pendidikan Kota Solok untuk mencapai target kinerja pada setiap tahun pelaksanaan.

Program dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Solok ditampilkan pada **Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok**, serta dirinci pada **Tabel 4.2 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok** sebagai berikut.



TABEL 4.1
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Meningka tnya partisipa si dan kualitas pendidik an	Meningka tnya pemerata an dan kualitas pendidik an serta pemajua n kebudaya an daerah						
					Harapan Lama Sekolah		
					Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
					Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%)		
	Meningka tnya pemerata an akses dan mutu layanan				Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan (Angka)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		pendidika n pada jenjang Pendidika n PAUD, Dasar dan Kesetaraa n			Persentase satuan pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi) (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Persentase satuan pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi) (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningka tnya Akses layanan dan capaian hasil belajar peserta didik		Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
					Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Terselenggaranya proses pembelajaran pada jenjang Sekolah Dasar yang efektif dan berkualitas	APK Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					APM Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Rasio Ketersediaan Guru Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Indeks Sarana Prasarana Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.0103 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.0104 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.0106 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.0109 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1.01.02.2.0110 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.0111 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.0114 Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.0119 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.0125 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.0126 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.0127 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.0128 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.0129 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.0130 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.0131 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.0135 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1.01.02.2.0136 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.0138 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Kegiatan)	1.01.02.2.0139 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.0142 Penyediaan infrastruktur TIK	
					Jumlah Peserta Didik yang Menerima Perlengkapan Peserta Didik (Orang)	1.01.02.2.0146 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.0147 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.2.0148 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.0149 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.0150 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.2.0151 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.0154 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.0155 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas dan berstandar di Pengelola sekolah menengah pertama	APK sekolah menengah pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					APM sekolah menengah pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Rasio Ketersediaan Guru sekolah menengah pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Indeks Sarana Prasarana sekolah menengah pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Menengah Pertama yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.0206 Pembangunan Laboratorium	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.0212 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.2.0214 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.2.0216 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Unit)	1.01.02.2.0217 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi (Unit)	1.01.02.2.0218 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Unit)	1.01.02.2.0221 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Unit)	1.01.02.2.0223 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Unit)	1.01.02.2.0224 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.0225 Pengadaan Mebel Sekolah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1.01.02.2.0230 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.01.02.2.0232 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.01.02.2.0238 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.0239 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.0240 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.01.02.2.0241 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.0242 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.0243 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.0248 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.0250 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.0251 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Kegiatan)	1.01.02.2.0252 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Pendampingan Pencegahan Perundungan / Kekerasan / Intoleransi	1.01.02.2.0255 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.0258 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Telah Dibangun (Ruang)	1.01.02.2.0259 Pembangunan Ruang Kelas Baru	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.0260 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Peserta Didik yang Menerima Perlengkapan Peserta Didik (Orang)	1.01.02.2.0262 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.2.0264 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.01.02.2.0267 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1.01.02.2.0268 Penyediaan infrastruktur TIK	
				Terselenggaranya layanan pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan bermutu	APK PAUD	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Proporsi Guru Minimal S1 PAUD/BK	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Indeks Sarana Prasarana PAUD	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi Minimal B	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1.01.02.2.0302 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan PAUD (Orang)	1.01.02.2.0315 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.01.02.2.0316 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.0317 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.0318 Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1.01.02.2.0319 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.0325 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Kegiatan)	1.01.02.2.0326 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.01.02.2.0339 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Peserta Didik yang Menerima Perlengkapan Peserta Didik (Orang)	1.01.02.2.0341 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1.01.02.2.0345 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Satuan PAUD yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.0347 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
				Terselenggaranya Proses Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan dan kecakapan hidup yang Bermutu/baik/atau target lain untuk pendidikan kesetaraan	Menurunnya Angka anak tidak sekolah	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseta raan	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Kemampuan Literasi SD Kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseta raan	
					Kemampuan Literasi SMP Kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseta raan	
					Kemampuan Numerasi SD Kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseta raan	
					Kemampuan Numerasi SMP Kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseta raan	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Persentase Peserta Pelatihan yang Mampu Berwirausaha dan Bekerja	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	1.01.02.2.0414 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.0417 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.0427 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Peserta Didik yang Menerima Perlengkapan Peserta Didik (Orang)	1.01.02.2.0436 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	1.01.02.2.0441 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Satuan Non Formal/Kesetaraan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.0446 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningkatnya pembentukan karakter peserta didik melalui penguatan implementasi kurikulum muatan lokal		<p>Nilai Karakter Peserta Didik SD (Angka)</p> <p>Nilai Karakter Peserta Didik SMP (Angka)</p> <p>Nilai pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi pada peserta didik PAUD (Angka)</p>	<p>1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</p> <p>1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</p> <p>1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</p>	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya Pemerataan dan Penataan Kualitas Guru Di Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan mengembangkan Materi Kurikulum Muatan Lokal Secara Terintegrasi	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
					Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1.01.03.2.0107 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatkan Penataan Pendistribusian dan Kualitas Guru Di Satuan Pendidikan	<p>Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal mengembangkan Materi Kurikulum Muatan Lokal Secara Terintegrasi</p>	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
					<p>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)</p>	1.01.03.2.0202 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningka tnya kualitas dan pemerata an distribusi pendidik dan tenaga Kependidi kan		Indeks distribusi guru PAUD (Angka)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Indeks distribusi guru SD (Angka)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Indeks distribusi guru SMP (Angka)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Persentase guru PAUD yang memiliki Sertifikasi Pendidik (%)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Persentase guru SD yang memiliki Sertifikasi Pendidik (%)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Persentase guru SMP yang memiliki Sertifikasi Pendidik (%)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
					Rasio Guru Per Rombel	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1.01.04.2.0101 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Dialokasikan/ Didistribusikan Sesuai Kebutuhan Satuan Pendidikan	1.01.04.2.0102 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian pemanfaatan dan		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		an	pembinaa n Kebudaya an Daerah		Jumlah kegiatan Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan (Kegiatan)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
					Jumlah pranata budaya yang difasilitasi (Lembaga)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
				Jumlah Pelaku budaya yang di fasilitasi	Jumlah Komunitas/ Pelaku Budaya yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Kebudayaan (Kelompok)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.0101 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
				Jumlah Seni Tradisi yang Dilestarikan	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Dilaksanakan (Kegiatan)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.2.0203 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang Difasilitasi dalam Pembinaan	2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	2.22.02.2.0302 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	
			Meningka tnya peran serta masyarak at dalam pengemba ngan kesenian tradisiona l		Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
						2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningka tkan Pelestaria n Cagar Budaya		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan (Cagar Budaya)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
					Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang Diverifikasi untuk Penetapan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.0102 - Penetapan Cagar Budaya	
				Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Dikelola/Difasilitasi	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.0201 - Pelindungan Cagar Budaya	
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan)	2.22.05.2.03 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek)	2.22.05.2.0301 - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan)	2.22.05.2.0302 - Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		Meningka tnya Akuntabil itas dan Pelayana n Perangka t Daerah	Meningka tnya fasilitasi pelaksana an tugas dan fungsi perangkat daerah		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
						1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.01.01.2.0101 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.01.01.2.0106 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.01.01.2.0201 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.01.01.2.0207 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.01.01.2.0502 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.01.01.2.0503 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.01.01.2.0509 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.0601 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.0604 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.01.01.2.0605 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.01.01.2.0608 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.01.01.2.0609 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.01.01.2.0706 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.01.01.2.0801 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.0802 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.01.01.2.0804 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.01.01.2.0902 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.01.01.2.0906 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.01.01.2.0909 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi		Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			internal Perangkat Daerah		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	
					Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.01.01.2.0101 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.01.01.2.0104 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.01.01.2.0106 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.01.01.2.0107 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.01.01.2.0108 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.01.01.2.0207 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARA N RPJM YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOM E	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE T.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Meningka tnya pengelola an retribusi daerah		Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah (%)	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1.01.01.2.0407 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Pendanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok

Bagian ini memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, serta pendanaan yang menjadi dasar pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Solok dalam kurun waktu 2025–2029. Penyusunan rencana ini merupakan penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, sehingga seluruh kebijakan Dinas Pendidikan Kota Solok dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan dan diukur capaian kinerjanya.

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan disusun untuk memastikan keterpaduan antara prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan sektor pendidikan, serta untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD Kota Solok 2025–2029. Setiap program yang ditetapkan dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan tahunan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat tata kelola, dan memenuhi kebutuhan pembangunan pendidikan secara berkelanjutan.

Selain itu, bagian ini juga menyajikan pendanaan indikatif yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Informasi pendanaan tersebut memberikan gambaran mengenai kebutuhan sumber daya yang harus dipenuhi, sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan di sektor pendidikan.

Dengan demikian, rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh agenda strategis dinas pendidikan kota solok dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Rincian lengkap disajikan pada tabel dan uraian berikutnya, yang menggambarkan rencana implementasi kebijakan Dinas Pendidikan Kota Solok untuk periode 2025–2029.

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				137.092.210.845		138.543.481.891		139.697.881.769		140.622.848.174		141.561.689.076		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				105.795.078.824		106.861.187.569		107.772.484.521		108.697.450.926		109.636.291.828		
Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	100	100	105.400.549.024	100	106.851.187.569	100	107.762.484.521	100	108.687.450.926	100	109.626.291.828	1.01.2.22.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN	
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				101.813.776.865		103.264.415.410		104.175.712.362		105.100.678.767		106.039.519.669		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	5	11.075.000,00	5	11.075.000,00	5	0,00	5	11.075.000,00	5	11.075.000,00		
tersedianya gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	820	820	110.569.072.938,00	820	113.187.990.541,00	820	116.137.990.541,00	820	119.160.990.541,00	820	119.160.990.541,00		
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				101.802.701.865		103.264.115.410		104.175.412.362		105.100.378.767		106.039.219.669		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	10.536	10.536	101.802.701.865	10.536	103.264.115.410	10.536	104.175.412.362	10.536	105.100.378.767	10.536	106.039.219.669		
1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran				11.075.000		300.000		300.000		300.000		300.000		

SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	18	11.075.000	5	300.000	5	300.000	5	300.000	5	300.000		
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				28.096.000		28.096.000		28.096.000		28.096.000		28.096.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	9.300.000,00	1	9.300.000,00	1	9.300.000,00	1	9.300.000,00	1	9.300.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4	18.796.000,00	4	18.796.000,00	4	18.796.000,00	4	18.796.000,00	4	18.796.000,00		
1.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0		0		0		0		0		
1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	9.300.000	1	9.300.000	1	9.300.000	1	9.300.000	1	9.300.000		
1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				18.796.000		18.796.000		18.796.000		18.796.000		18.796.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4	4	18.796.000	4	18.796.000	4	18.796.000	4	18.796.000	4	18.796.000		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				458.828.300		458.828.300		458.828.300		458.828.300		458.828.300		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	323.999.800,00	12	323.999.800,00	12	323.999.800,00	12	323.999.800,00	12	323.999.800,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		

Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	85.823.500,00	1	85.823.500,00	1	85.823.500,00	1	85.823.500,00	1	85.823.500,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	7.005.000,00	12	7.005.000,00	12	7.005.000,00	12	7.005.000,00	12	7.005.000,00		
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000		
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				85.823.500		85.823.500		85.823.500		85.823.500		85.823.500		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	85.823.500	1	85.823.500	1	85.823.500	1	85.823.500	1	85.823.500		
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				7.005.000		7.005.000		7.005.000		7.005.000		7.005.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	7.005.000	12	7.005.000	12	7.005.000	12	7.005.000	12	7.005.000		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				323.999.800		323.999.800		323.999.800		323.999.800		323.999.800		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	323.999.800	12	323.999.800	12	323.999.800	12	323.999.800	12	323.999.800		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.621.842.659		2.621.842.659		2.621.842.659		2.621.842.659		2.621.842.659		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.800.342.500,00	12	1.800.342.500,00	12	1.800.342.500,00	12	1.800.342.500,00	12	1.800.342.500,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	820.000.159,00	1	820.000.159,00	1	820.000.159,00	1	820.000.159,00	1	820.000.159,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		

1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000		
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				820.000.159		820.000.159		820.000.159		820.000.159		820.000.159		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	820.000.159	1	820.000.159	1	820.000.159	1	820.000.159	1	820.000.159		
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.800.342.500		1.800.342.500		1.800.342.500		1.800.342.500		1.800.342.500		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.800.342.500	12	1.800.342.500	12	1.800.342.500	12	1.800.342.500	12	1.800.342.500		
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				478.005.200		478.005.200		478.005.200		478.005.200		478.005.200		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	80	80	417.995.200,00	80	417.995.200,00	80	417.995.200,00	80	417.995.200,00	80	417.995.200,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	56	56	30.010.000,00	56	30.010.000,00	56	30.010.000,00	56	30.010.000,00	56	30.010.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	587.917.603,00	1	847.000.000,00	1	847.000.000,00	1	847.000.000,00	1	847.000.000,00		
1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				417.995.200		417.995.200		417.995.200		417.995.200		417.995.200		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	80	80	417.995.200	80	417.995.200	80	417.995.200	80	417.995.200	80	417.995.200		
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.010.000		30.010.000		30.010.000		30.010.000		30.010.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	56	56	30.010.000	56	30.010.000	56	30.010.000	56	30.010.000	56	30.010.000		
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	10,80	11,50	394.029.800	11,85	9.500.000	12,20	9.500.000	12,55	9.500.000	12,90	9.500.000		
	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	18,75	18,95		19,05		19,15		19,25		19,35			
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	22,50	23,40		23,85		24,30		24,75		25,20			
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	23,10	23,80		24,15		24,50		24,85		25,10			
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				394.029.800		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)													
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				384.029.800		8.500.000		8.500.000		8.500.000		8.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		12	384.029.800	6	8.500.000	6	8.500.000	6	8.500.000	6	8.500.000		
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		18	10.000.000	18	500.000	18	500.000	18	500.000	18	500.000		

1.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
Meningkatnya pengelolaan retribusi daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah (%)	100	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000		
1.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
1.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				31.135.663.221		31.520.825.522		31.763.928.448		31.763.928.448		31.763.928.448		
Meningkatnya Akses layanan dan capaian hasil belajar peserta didik	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	78,33	84,34	31.135.663.221	87,31	31.520.825.522	90,28	31.763.928.448	92,83	31.763.928.448	95,37	31.763.928.448	1.01.2.22.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN	
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	98,52	98,90		99,09		99,29		99,48		99,67			
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	63,04	76,03		76,79		77,55		78,32		79,08			
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	64,11	69,11		71,61		74,11		76,61		79,11			
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	76,52	78,72		79,82		80,92		82,02		83,12			
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	53,15	58,95		61,85		64,75		67,65		70,55			
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	66,41	69,41		70,91		72,41		73,91		75,41			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				13.139.966.129		13.089.966.129		13.518.246.356		13.468.246.356		13.468.246.356		
Terselenggaranya proses pembelajaran pada jenjang Sekolah Dasar yang efektif	APK Sekolah Dasar	102,81	103,2		107,95		110,10		112,3		113,4			

dan berkualitas														
	Rasio Ketersediaan Guru Sekolah Dasar	01.15	01.16		01.18		01.20		01.22		01.25			
	Indeks Sarana Prasarana Sekolah Dasar	82,95	83,15		83,85		84,10		84,75		85			
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A	50	55		60		75		85		93			
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah				15.000		15.000		50.000.000		150.000.000		150.000.000		

Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	2	0	15.000	0	15.000	100	50.000.000	309	150.000.000	309	150.000.000		
1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				101.920.000		101.920.000		101.920.000		101.920.000		101.920.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1	1	101.920.000	1	101.920.000	1	101.920.000	1	101.920.000	1	101.920.000		
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				426.140.700		426.140.700		426.140.700		426.140.700		426.140.700		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	73	73	426.140.700	73	426.140.700	73	426.140.700	73	426.140.700	73	426.140.700		
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				2.153.055.000		2.153.055.000		2.153.055.000		2.153.055.000		2.153.055.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	141	141	2.153.055.000	141	2.153.055.000	141	2.153.055.000	141	2.153.055.000	141	2.153.055.000		
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				382.808.880		382.808.880		382.808.880		382.808.880		382.808.880		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	63	20	382.808.880	20	382.808.880	20	382.808.880	20	382.808.880	20	382.808.880		
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				0		20.015.000		20.045.000		28.325.227		28.325.227		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	48	48	0	48	20.015.000	48	20.045.000	48	28.325.227	48	28.325.227		
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				7.770.600.000		7.770.600.000		7.770.600.000		7.770.600.000		7.770.600.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	48	48	7.770.600.000	48	7.770.600.000	48	7.770.600.000	48	7.770.600.000	48	7.770.600.000		
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				49.675.000		49.675.000		49.675.000		49.675.000		49.675.000		

Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	47	141	49.675.000	141	49.675.000	141	49.675.000	141	49.675.000	141	49.675.000		
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				677.256.400		377.256.400		377.256.400		377.256.400		377.256.400		
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	677.256.400	1	377.256.400	1	377.256.400	1	377.256.400	1	377.256.400		
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				58.999.800		58.999.800		58.999.800		58.999.800		58.999.800		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100	100	58.999.800	100	58.999.800	100	58.999.800	100	58.999.800	100	58.999.800		
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				0		0		0		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	8	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000		
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				4.920.000		4.920.000		4.920.000		4.920.000		4.920.000		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	4.920.000	1	4.920.000	1	4.920.000	1	4.920.000	1	4.920.000		
1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK				0		0		378.265.227		0		0		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1	0	0	0	0	1	378.265.227	0	0	0	0		
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				364.019.200		364.019.200		364.019.200		364.019.200		364.019.200		
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.600	1.600	364.019.200	1.600	364.019.200	1.600	364.019.200	1.600	364.019.200	1.600	364.019.200		
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		

Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				15.000		15.000		15.000		150.000.000		150.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	3	150.000.000	3	150.000.000		
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				436.603.149		416.603.149		416.603.149		436.603.149		436.603.149		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	35	35	436.603.149	35	416.603.149	35	416.603.149	35	436.603.149	35	436.603.149		
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				707.803.000		707.803.000		707.803.000		707.803.000		707.803.000		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	48	48	707.803.000	48	707.803.000	48	707.803.000	48	707.803.000	48	707.803.000		
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				15.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	15.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				0		0		0		0		0		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	73	73	15.000	73	15.000	73	15.000	73	15.000	73	15.000		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				8.643.222.992		9.028.385.293		8.893.207.992		8.893.207.992		8.893.207.992		
Terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas dan berstandar di Pengelola sekolah menengah pertama&	APK sekolah menengah pertama	100,8	101,7		101,9		102,3		102,6		103			
	APM sekolah menengah pertama	80,56	81,22		82,45		83,56		85,77		89,90			

	Rasio Ketersediaan Guru sekolah menengah pertama	01.13	01.14		01.15		01.16		01.17		01.18			
	Indeks Sarana Prasarana sekolah menengah pertama	82,95	83,40		84,45		86,20		87,95		90			
	Persentase Satuan Pendidikan sekolah menengah pertama yang terakreditasi A	55,56	57,20		58,25		59,73		60		62,45			
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.02.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		

Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)		1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				15.000		15.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1	15.000	1	15.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000		
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah				330.495.000		330.495.000		330.495.000		330.495.000		330.495.000		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	1	330.495.000	1	330.495.000	1	330.495.000	1	330.495.000	1	330.495.000		
1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				50.960.000		50.960.000		50.960.000		50.960.000		50.960.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1	1	50.960.000	1	50.960.000	1	50.960.000	1	50.960.000	1	50.960.000		
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				0		0		0		0		0		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				254.400.092		254.400.092		254.400.092		254.400.092		254.400.092		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0	100	254.400.092	100	254.400.092	100	254.400.092	100	254.400.092	100	254.400.092		
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.573.178.300		1.573.178.300		1.573.178.300		1.573.178.300		1.573.178.300		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	72	72	1.573.178.300	72	1.573.178.300	72	1.573.178.300	72	1.573.178.300	72	1.573.178.300		
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				641.727.000		641.727.000		641.727.000		641.727.000		641.727.000		

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	127	127	641.727.000	127	641.727.000	127	641.727.000	127	641.727.000	127	641.727.000		
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				0		0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	8	8	0	8	0	8	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000		
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				4.938.200.000		4.938.200.000		4.938.200.000		4.938.200.000		4.938.200.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	8	8	4.938.200.000	8	4.938.200.000	8	4.938.200.000	8	4.938.200.000	8	4.938.200.000		
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				23.850.000		23.850.000		23.850.000		23.850.000		23.850.000		
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	24	24	23.850.000	24	23.850.000	24	23.850.000	24	23.850.000	24	23.850.000		
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				58.999.700		58.999.700		58.999.700		58.999.700		58.999.700		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)		70	58.999.700	70	58.999.700	70	58.999.700	70	58.999.700	70	58.999.700		
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	-	-	0	-	0	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000		
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2.325.000		2.325.000		2.325.000		2.325.000		2.325.000		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	2.325.000	1	2.325.000	1	2.325.000	1	2.325.000	1	2.325.000		
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang				4.920.000		4.920.000		4.920.000		4.920.000		4.920.000		

Pendidikan														
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	4.920.000	1	4.920.000	1	4.920.000	1	4.920.000	1	4.920.000		
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				0		0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	-	-	0	-	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				244.693.000		244.693.000		244.693.000		244.693.000		244.693.000		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	9	9	244.693.000	9	244.693.000	9	244.693.000	9	244.693.000	9	244.693.000		
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				146.296.000		146.296.000		146.296.000		146.296.000		146.296.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	40	40	146.296.000	40	146.296.000	40	146.296.000	40	146.296.000	40	146.296.000		
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				273.013.900		273.013.900		273.013.900		273.013.900		273.013.900		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1.200	1.200	273.013.900	1.200	273.013.900	1.200	273.013.900	1.200	273.013.900	1.200	273.013.900		
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000		
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		

Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	55	55	15.000	55	15.000	55	15.000	55	15.000	55	15.000		
1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK				0		385.162.301		0		0		0		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	-	-	0	1	385.162.301	-	0	-	0	-	0		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				5.294.231.200		5.294.231.200		5.294.231.200		5.294.231.200		5.294.231.200		
Terselenggaranya layanan pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan bermutu	APK PAUD	67,95	68		68,66		67		67,55		68			
	Proporsi Guru Minimal S1 PAUD/BK	54,5	55		55,7		56		56,8		58			
	Indeks Sarana Prasarana PAUD	2,47	2,58		3		3,16		3,75		4			
	Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi Minimal B	26,15	30,25		31,45		32,55		33,50		35			
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				3.569.450.000		3.569.450.000		3.569.450.000		3.569.450.000		3.569.450.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	309	309	3.569.450.000	309	3.569.450.000	309	3.569.450.000	309	3.569.450.000	309	3.569.450.000		
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				115.425.000		115.425.000		115.425.000		115.425.000		115.425.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	67	67	115.425.000	67	115.425.000	67	115.425.000	67	115.425.000	67	115.425.000		
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				12.600.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	67	67	12.600.000	67	12.600.000	67	12.600.000	67	12.600.000	67	12.600.000		

1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				1.303.200.000		1.303.200.000		1.303.200.000		1.303.200.000		1.303.200.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	67	67	1.303.200.000	67	1.303.200.000	67	1.303.200.000	67	1.303.200.000	67	1.303.200.000		
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				25.650.000		25.650.000		25.650.000		25.650.000		25.650.000		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	67	67	25.650.000	67	25.650.000	67	25.650.000	67	25.650.000	67	25.650.000		
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		7.200.000		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000	1	7.200.000		
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				5.058.000		5.058.000		5.058.000		5.058.000		5.058.000		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	67	5.058.000	1	5.058.000	1	5.058.000	1	5.058.000	1	5.058.000		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0		
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				150.335.800		150.335.800		150.335.800		150.335.800		150.335.800		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	500	150.335.800	500	150.335.800	500	150.335.800	500	150.335.800	500	150.335.800		
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000		
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				45.162.400		45.162.400		45.162.400		45.162.400		45.162.400		

Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	67	67	45.162.400	67	45.162.400	67	45.162.400	67	45.162.400	67	45.162.400		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4.058.242.900		4.108.242.900		4.058.242.900		4.108.242.900		4.108.242.900		
Terselenggaranya Proses Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan dan kecakapan hidup yang Bermutu/baik/atau target lain untuk pendidikan kesetaraan	Angka anak tidak sekolah	3,2	3		2,5		2		1,5		1			
	Kemampuan Literasi SD Kesetaraan	66,67	67		67,5		68		68,5		69			
	Kemampuan Literasi SMP Kesetaraan	66,12	67		67,5		68		68,5		69			
	Kemampuan Numerasi SD Kesetaraan	27,12	30		31,5		32		32,5		33			
	Kemampuan Numerasi SMP Kesetaraan	54,84	55		56		56,5		57		58			
	Persentase Peserta Pelatihan yang Mampu Berwirausaha dan Bekerja	25	30		35		40		45		50			
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3.678.840.000		3.678.840.000		3.678.840.000		3.678.840.000		3.678.840.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	356	356	3.678.840.000	356	3.678.840.000	356	3.678.840.000	356	3.678.840.000	356	3.678.840.000		
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				302.800.000		302.800.000		302.800.000		302.800.000		302.800.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	1	302.800.000	1	302.800.000	1	302.800.000	1	302.800.000	1	302.800.000		
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2.600.100		2.600.100		2.600.100		2.600.100		2.600.100		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2	2	2.600.100	2	2.600.100	2	2.600.100	2	2.600.100	2	2.600.100		
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				9.835.000		9.835.000		9.835.000		9.835.000		9.835.000		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	10	10	9.835.000	10	9.835.000	10	9.835.000	10	9.835.000	10	9.835.000		
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan				0		50.000.000		0		50.000.000		50.000.000		

Utilitas Sekolah														
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000		
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				64.167.800		64.167.800		64.167.800		64.167.800		64.167.800		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	67	67	64.167.800	67	64.167.800	67	64.167.800	67	64.167.800	67	64.167.800		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				142.444.000		142.444.000		142.444.000		142.444.000		142.444.000		
Meningkatnya pembentukan karakter peserta didik melalui penguatan implementasi kurikulum muatan lokal	Nilai pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi pada peserta didik PAUD (Angka)	70,26	75,76	142.444.000	76,45	142.444.000	77,14	142.444.000	77,83	142.444.000	78,51	142.444.000	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN	
	Nilai Karakter Peserta Didik SMP (Angka)	55,43	57,06		57,88		58,70		59,51		60,33			
	Nilai Karakter Peserta Didik SD (Angka)	58,1	61,54		63,26		64,98		66,7		68,42			
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				123.120.000		123.120.000		123.120.000		123.120.000		123.120.000		
Meningkatnya satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter melalui kurikulum Muatan lokal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	57	1	123.120.000,00	0	123.120.000,00	57	123.120.000,00	0	123.120.000,00	57	123.120.000,00		
1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				123.120.000		123.120.000		123.120.000		123.120.000		123.120.000		
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	57	1	123.120.000	57	123.120.000	57	123.120.000	0	123.120.000	57	123.120.000		
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				19.324.000		19.324.000		19.324.000		19.324.000		19.324.000		
Meningkatnya satuan PAUD Formal dan Kesetaraan yang menerapkan kurikulum Muatan lokal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	67	67	19.324.000,00	0	19.324.000,00	67	19.324.000,00	0	19.324.000,00	0	19.324.000,00		
1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				19.324.000		19.324.000		19.324.000		19.324.000		19.324.000		

Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)		1	19.324.000	1	19.324.000	1	19.324.000	1	19.324.000	1	19.324.000		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				19.024.800		19.024.800		19.024.800		19.024.800		19.024.800		
Meningkatnya kualitas dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga Kependidikan	Indeks distribusi guru SD (Angka)	0,66	0,72	19.024.800	0,79	19.024.800	0,85	19.024.800	0,92	19.024.800	0,98	19.024.800	1.01.2.22.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN	
	Persentase guru PAUD yang memiliki Sertifikasi Pendidik (%)	18,00	55,00		57		59		61		63			
	Indeks distribusi guru SMP (Angka)	0,56	0,62		0,68		0,74		0,80		0,86			
	Indeks distribusi guru PAUD (Angka)	0,5	0,55		0,6		0,65		0,7		0,74			
	Persentase guru SD yang memiliki Sertifikasi Pendidik (%)	55,40	72,00		74		76		78		80			
	Persentase guru SMP yang memiliki Sertifikasi Pendidik (%)	55,43	67,00		69		71		73		75			
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				19.024.800		19.024.800		19.024.800		19.024.800		19.024.800		
Meningkatkan Penataan Pendistribusian dan Kualitas Guru Di Satuan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	124	124	19.024.800,00	124	19.024.800,00	124	19.024.800,00	124	19.024.800,00	124	19.024.800,00		
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				19.024.800		19.024.800		19.024.800		19.024.800		19.024.800		
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1	1	19.024.800	1	14.024.800	1	14.024.800	1	14.024.800	1	14.024.800		
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)		0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				976.720.300		476.720.300		476.720.300		476.720.300		476.720.300		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				928.720.300		383.720.300		383.720.300		383.720.300		383.720.300		
Meningkatnya pelestarian pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan (Kegiatan)	3	3	928.720.300	3	383.720.300	3	383.720.300	3	383.720.300	3	383.720.300	1.01.2.22.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN	
	Jumlah pranata budaya yang difasilitasi (Lembaga)		2		2		2		2		2			
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000		0		0		0		0		
Jumlah Pelaku budaya yang di fasilitasi	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	6	7	500.000.000	7	0	8	0	9	0	9	0		
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				500.000.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	6	7	500.000.000	7	0	8	0	9	0	9	0		
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				247.000.000		247.000.000		247.000.000		247.000.000		247.000.000		
Jumlah Seni Tradisi yang Dilestarikan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	1	1	247.000.000	1	247.000.000	1	247.000.000	1	247.000.000	1	247.000.000		
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				247.000.000		247.000.000		247.000.000		247.000.000		247.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	1	247.000.000	1	247.000.000	1	247.000.000	1	247.000.000	1	247.000.000		

2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				181.720.300		136.720.300		136.720.300		136.720.300		136.720.300		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	1	1	181.720.300	1	136.720.300	1	136.720.300	1	136.720.300	1	136.720.300		
2.22.02.2.03.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				181.720.300		136.720.300		136.720.300		136.720.300		136.720.300		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1	1	181.720.300	1	136.720.300	1	136.720.300	1	136.720.300	1	136.720.300		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	33,33	44,44	0	55,56	25.000.000	66,67	25.000.000	77,78	25.000.000	88,89	25.000.000	1.01.2.22.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN	
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Meningkatnya Pembinaan Kesenian	Terlaksananya pelatihan/pembinaan kesenian	1	1	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				0		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	-	-	0	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan sejarah (Kegiatan)		2	0	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	1.01.2.22.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN	
	Sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal sejarah daerah dalam pembelajaran (%)		100		100		100		100		100			
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Meningkatnya Pembinaan Sejarah Lokal	Penerbitan Konten Sejarah Lokal dalam Media Publik	-	-	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	-	-	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		
Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	42,86	53,33	48.000.000	56,25	48.000.000	58,82	48.000.000	61,11	48.000.000	63,16	48.000.000	1.01.2.22.0.00.01.000 - DINAS PENDIDIKAN	
	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan (Cagar Budaya)	14	15		16		17		18		19			
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)													
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	6	7	48.000.000	9	48.000.000	9	48.000.000	9	48.000.000	9	48.000.000		

4.3 Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan yang tercantum dalam tabel berikut merupakan penjabaran operasional dari program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Solok yang secara langsung mendukung pencapaian **Program Prioritas Pembangunan Daerah** sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok 2025–2029. Penyusunan subkegiatan ini dilakukan melalui proses sinkronisasi antara arah kebijakan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok, serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan pendidikan pada seluruh jenjang.

Subkegiatan dirancang untuk memastikan bahwa setiap program prioritas daerah mendapatkan dukungan implementasi yang konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap subkegiatan memuat keterkaitan dengan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan indikatif yang diperlukan dalam lima tahun ke depan. Penjabaran ini sekaligus menggambarkan kontribusi nyata sektor pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan, penguatan tata kelola, dan pencapaian target pembangunan daerah secara keseluruhan.

TABEL 4.3
SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Akses layanan dan capaian hasil belajar peserta didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan infrastruktur TIK Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya pembentukan karakter peserta didik melalui penguatan implementasi kurikulum muatan lokal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan	

			Pendidikan Nonformal	
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya kualitas dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
4.	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan Daerah	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN									
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,37	11,58	11,67	11,77	11,86	11,95	12,04	
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,37	14,52	14,60	14,69	14,77	14,85	14,93	
4.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	56	57	58	59,03	60,01	60,58	61	
5.	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Angka	79,28	81,07	82,85	84,64	86,43	88,21	90	
6.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	70	75	85	87	93	95	95,57	
7.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	75,15	76,40	77,65	78,90	80,15	81,40	82,65	
8.	Persentase satuan pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Literasi)	%	66,27	77,27	78	79	80	81,82	82	
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	82,65	83,00	86,00	86,50	87,00	88,00	88,50	
10.	Persentase satuan pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Numerasi)	%	50,60	51,14	53	54	55	56,82	58	
11.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	0	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	4,15	

Tabel 4.5 menunjukkan perkembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Solok yang direncanakan untuk periode 2025–2030. Secara umum, seluruh indikator memperlihatkan tren peningkatan bertahap yang mencerminkan upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, pelestarian kebudayaan, serta tata kelola Dinas Pendidikan Kota Solok.

Pada aspek pembangunan pendidikan, indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah menunjukkan kenaikan konsisten dari tahun ke tahun, menandakan peningkatan akses, keberlanjutan, dan partisipasi pendidikan masyarakat. Demikian pula, Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan mengalami peningkatan signifikan menuju capaian 90 pada tahun 2030, menggambarkan penguatan pemenuhan standar layanan dasar pendidikan.

Dalam bidang kebudayaan, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan persentase warisan budaya yang dilestarikan menunjukkan tren positif, dengan peningkatan dari 70% menjadi lebih dari 95% pada akhir periode. Hal ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pelestarian budaya daerah.

Indikator tata kelola seperti Nilai SAKIP, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat juga menunjukkan perbaikan yang stabil, mengindikasikan peningkatan efektivitas manajemen, kualitas layanan, serta kepuasan pengguna layanan pendidikan.

Pada aspek capaian belajar, indikator kompetensi minimum literasi dan numerasi menunjukkan peningkatan tahunan yang konsisten. Literasi meningkat dari 66,27% menjadi 82%, sementara numerasi meningkat dari 50,60% menjadi 58%. Hal ini menggambarkan penguatan kualitas pembelajaran dan implementasi asesmen nasional.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kota Solok diarahkan pada peningkatan akses, mutu layanan, pelestarian budaya, dan tata kelola yang lebih baik dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMD 2025–2029 serta sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok hingga tahun 2030.

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
2.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	positif	%	78,33	81,37	84,34	87,31	90,28	92,83	95,37	
3.	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	positif	%	98,52	98,71	98,90	99,09	99,29	99,48	99,67	
4.	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	positif	Persentase	63,04	69,53	76,03	76,79	77,55	78,32	79,08	
5.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	positif	Nilai	64,11	66,61	69,11	71,61	74,11	76,61	79,11	
6.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	76,52	77,62	78,72	79,82	80,92	82,02	83,12	
7.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	positif	Nilai	53,15	56,05	58,95	61,85	64,75	67,65	70,55	
8.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	66,41	67,91	69,41	70,91	72,41	73,91	75,41	
9.	Iklm Inklusivitas SD	positif	Nilai	56,79	59,29	61,79	64,29	66,79	69,29	71,79	
10.	Iklm Inklusivitas SMP	positif	Nilai	59,75	62,15	64,55	66,95	69,35	71,75	74,15	
11.	Iklm Keamanan SD	positif	Nilai	73,60	74,50	75,40	76,30	77,20	78,10	79,00	
12.	Iklm Keamanan SMP	positif	Nilai	69,50	71,00	72,50	74,00	75,50	77,00	78,50	
13.	Iklm Kebhinekaan SD	positif	Nilai	70,85	71,85	72,85	73,85	74,85	75,85	76,85	
14.	Iklm Kebinekaan SMP	positif	Nilai	69,88	70,88	71,88	72,88	73,88	74,88	75,88	

15.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	positif	%	65,00	72,78	91,96	100	100	100	100	
16.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	positif	%	95,65	98,33	98,83	99,33	99,83	100	100	
17.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
18.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	positif	Persentase	70	75	85	87	93	95	95,57	
19.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Didaftarkan		%	30	35	45	55	65	75	85	
20.	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi dibidang Kebudayaan		%	50	50	65	77	85	92	95	

Tabel 4.6 menyajikan perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Kota Solok dengan baseline tahun 2024 dan target hingga 2030. Seluruh indikator menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan perbaikan mutu layanan pendidikan, capaian pembelajaran, serta kualitas tata kelola Dinas Pendidikan Kota Solok.

Kenaikan nilai setiap tahun menggambarkan upaya sistematis dalam meningkatkan kinerja sektor pendidikan, baik dari sisi pemerataan layanan, peningkatan kompetensi, maupun efektivitas manajemen. Secara umum, indikator yang berada pada kisaran 50–78 pada tahun dasar mengalami peningkatan bertahap hingga mendekati atau melampaui kisaran 70–95 pada tahun 2030.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa target kinerja telah disusun secara realistis dan progresif untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra serta tujuan pembangunan pendidikan dalam RPJMD Kota Solok 2025–2029

BAB V

PENUTUP


Rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang untuk menjawab tantangan dan isu strategis yang berkembang, sekaligus memastikan penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan renstra memerlukan konsistensi, termasuk penjabaran program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kerja tahunan, pengalokasian sumber daya secara efisien, serta penerapan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Seluruh pelaksanaan diarahkan untuk memastikan ketercapaiannya terhadap tujuan dan sasaran strategis, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional.

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran serta efektivitas pelaksanaan renstra diperlukan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis dan berkala. Pengendalian terhadap pelaksanaan renstra, memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Pengendalian dilakukan melalui mekanisme pemantauan, pelaporan, dan penelaahan kinerja secara berkala, baik pada level program, kegiatan maupun sub kegiatan. Pengendalian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul pada tahap pelaksanaan, menilai potensi deviasi dari target, serta merumuskan langkah korektif yang diperlukan untuk mengembalikan pelaksanaan pada jalur yang tepat. Pengendalian juga memberikan ruang untuk menyesuaikan strategi pelaksanaan apabila terdapat dinamika kebijakan, perubahan alokasi anggaran atau kondisi lingkungan yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Evaluasi renstra dilakukan untuk menilai efektivitas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Evaluasi dilaksanakan pada semua level, mulai dari capaian output, outcome, indikator kinerja kunci (IKK) dan indikator kinerja utama (IKU). Hasil evaluasi menjadi sumber informasi dalam mengukur keberhasilan implementasi renstra, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta merumuskan rekomendasi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan. Evaluasi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan sekaligus menjadi landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

Dengan demikian, renstra Dinas Pendidikan ini diharapkan menjadi pedoman dalam mengarahkan pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan agar lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Komitmen seluruh jajaran Dinas Pendidikan serta dukungan para pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan periode 2025-2029. Semoga renstra ini dapat menjadi instrumen strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat identitas dan nilai-nilai budaya daerah.

WALI KOTA SOLOK
RAMADHANI KIRANA PUTRA